

SKRIPSI

PEMBINAAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA

(Studi di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidrap)



Oleh

UNI ANDIRA A

NIM B111 13 056

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

PEMBINAAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA

(Studi di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidrap)

OLEH

UNI ANDIRA A

B111 13 056

SKRIPSI

**Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum**

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2017

PENGESAHAN SKRIPSI

PEMBINAAN NARAPIDANA DI RUMAH TAHANAN NEGARA

(Studi di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidrap)

Disusun dan diajukan oleh

UNI ANDIRA A

B111 13 056

Telah dipertahankan dihadapan panitia ujian skripsi yang dibentuk dalam
rangka penyelesaian studi program sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada Hari Senin 17 April 2017
Dan Dinyatakan Diterima

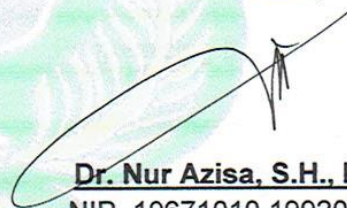
Panitia Ujian

Ketua,



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.
NIP. 19631024 198903 1 002

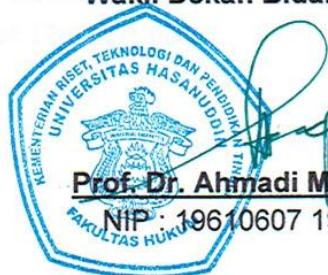
Sekretaris,



Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.
NIP. 19671010 199202 2 002

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H., M.H.
NIP. 19610607 198601 1 003

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa:

Nama : UNI ANDIRA A

Nomor Pokok : B 111 13 056

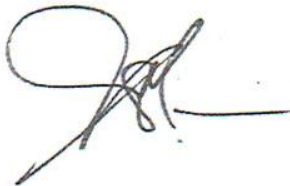
Judul Skripsi : PEMBINAAN NARAPIDANA DI RUMAH
TAHANAN NEGARA

(Studi di Rumah Tahanan Negara Klas IIB
Sidrap)

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas
Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar, Maret 2017

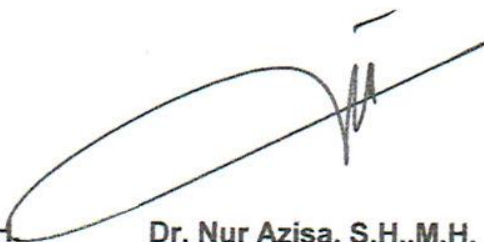
Pembimbing I



Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.

Nip. 19631024 198903 1 002

Pembimbing II



Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H.

Nip. 19671010 199202 2 002



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS HUKUM

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Makassar 90245 Telp/Fax : (0411)584686,587219, E-mail:hukum@unhas.ac.id

PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa :

Nama	: UNI ANDIRA. A
Nomor Pokok	: B11113056
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara (Studi di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidrap)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, April 2017 *h*

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan,



POL. DR. ALWALI MIRU, SH., MH

NIP. 196106071986011003

ABSTRAK

UNI ANDIRA A (B111 13 056) dengan judul “Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara (Studi Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidrap)”. Di bawah bimbingan (Syamsuddin Muchtar) sebagai Pembimbing I dan (Nur Azisa) sebagai Pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pelaksanaan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidrap dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Pelaksanaan pembinaan Narapidana di Rumah Tahan Negara Klas IIB Sidrap.

Penelitian ini di lakukan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidrap. Data yang diperoleh berasal dari data primer dan data skunder dengan menggunakan teknik pengumpulan data yaitu studi lapangan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. kemudian data yang diperoleh diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah secara kualitatif.

Berdasarkan hasil Penelitian di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidrap bahwa pelaksanaan pembinaan narapidana dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rutan Sidrap meliputi Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian yang dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Sedangkan pada Pasal 3 PP RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan yang meliputi ketakwaan kepada Tuhan YME; kesadaran berbangsa dan bernegara; intelektual; sikap dan prilaku; kesehatan jasmani dan rohani; kesadaran hukum; reintegrasi sehat dengan masyarakat; keterampilan kerja; dan latihan kerja dan produksi. Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rutan Sidrap pada kenyataannya belum sepenuhnya diterapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 3 PP RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan narapidana yaitu masalah jumlah pegawai yang kurang, anggaran, sarana dan prasarana, dan kerja sama dengan pihak luar yang kurang efektif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya serta Karunia-Nya yang diberikan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “**Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara** (Studi di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidrap) yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Hasanuddin.

Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari peran berbagai pihak yang tiada hentinya memberikan bimbingan, nasihat, dan dukungan. Terkhusus kepada ayahanda tercinta **Amri Jala** dan ibunda tercinta **Igena** yang selalu percaya pada mimpi-mimpi penulis dan dengan segenap jiwa dan hati selalu memberikan semangat dan dukungan. Terima kasih yang tiada hentinya atas kasih sayang yang tak terhingga, doa yang tak pernah putus, dan perjuangan serta dukungan yang tak pernah berhenti diberikan dalam setiap langkahku untuk bisa mencapai cita-citaku.

Kepada saudara-saudara penulis **Baharuddin, Adrian, dan Dimas** yang selalu menjadi motivasi dan senantiasa memberikan semangat bagi penulis dalam meraih cita-cita. Terimah kasih telah menjadi adik-adik yang begitu manis, perhatian, dan penuh kasih sayang, serta selalu memberikan senyum terindah kalian untukku. Semoga kelak kalian juga dapat menggenggam mimpi-mimpi kalian dan menjadi kebanggaan keluarga. Kepada keluarga besar Penulis yang selalu memberikan dukungan dan

bantuan baik secara moril maupun materil. Terima kasih semoga Tuhan membalas kebaikan kalian semua.

Kepada bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.** selaku pembimbing I dan ibu **Dr. Nur Azisa, S.H.,M.H.** selaku pembimbing II, terima kasih atas segala petunjuk, saran, bimbingan dan waktu yang telah diluangkan untuk Penulis. Selanjutnya kepada bapak **Prof. Dr. H. Muhadar, S.H.,M.S.**, bapak **Prof. Dr. H. M. Said Karim, S.H.,M.H.,M.Si.**, dan bapak **Dr. Abd. Asis, S.H.,M.H.**, selaku penguji yang telah memberikan masukan dan saran-sarannya kepada Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Pada kesempatan ini pula dengan segala kerendahan hati, Penulis ingin menyampaikan penghormatan dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Palubuhu, MA.** selaku Rektor Universitas Hasanuddin, serta para Wakil Rektor dan Staf Universitas Hasanuddin.
2. Ibu **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Bapak **Prof. Dr. Ahmadi Miru, S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Bapak **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Bapak **Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Ketua Departemen Hukum Pidana **Prof. Dr. H. Muhadar, S.H.,M.S** beserta seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, yang dengan perantaranya Penulis dapat menerima ilmu

pengetahuan tentang hukum selama menempuh pendidikan di almamater ini.

4. **Prof. Dr. Marthen Arie, S.H.,M.H.** selaku Penasehat Akademik Penulis yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
5. Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas hasanuddin atas segala bentuk bantuan dan pelayanan yang diberikan khususnya kepada penulis selama perkuliahan hingga penyusunan skripsi.
6. Kepala Rutan Klas IIB Sidrap dan Stafnya yang telah memberikan izin dan bantuan dalam melaksanakan penelitian.
7. Kepala Sekolah, Guru dan Staf SMAN 1 Tellu Limpoe, atas bantuan, motivasi dan dukungan yang selama ini diberikan kepada penulis untuk bias melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi.
8. Sahabat-sahabatku Risma, dan Luluyanti Baharuddin yang senantiasa memberikan semangat dan terkhusus Jurhana Jamal yang telah setia menemani penulis dalam melakukan penelitian di Rutan. Terima kasih untuk semuanya, kalian adalah sahabat, saudara, dan teman yang selama ini telah banyak memberi dan tak pernah meminta.
9. Teman seperjuanganku Puspikasari, Puspitasari, Angga Setiawan Hermanto, dan Rida Pungky Lole, S.H. yang dari awal hingga akhir selalu bersama, berbagi suka dan duka, saling membantu, memberikan semangat dan dukungan. Di hari esok, semoga kita semua bisa menggenggam dan mewujudkan mimpi kita masing-masing.
10. Teman-temanku Teman-teman TRM Nursyamsi Usman, Nur Winidiyah, Nur Lia Halim, Andi Suhartini, Alisyah Isdiyar Nabighar, Rini Wahyuningsih, Satriani Pandu, Nur Hasanah, Marsel, Harmonika, Natalia Pongbala, Mardatillah Rustam, Aprisanti Yusuf, Andi istiqamah, Nur Hidayat, Adenalta, Andi lasinrang, Muhammad Agung, Muhammad

Ruditya, Muhammad Pazrul Rahman, Muhammad Mubarak, azharul Nugraha, SH, Muh. Reski Ismail, Muh. Aldi Sido, Abrar, Andi Akhsan, Bagas Julnizar, Alfian Praditya, M. Ibnu Maulan, Muhammad Darul, Supriadi, Rusdianto Dwi A, Mardis, dan yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih karena telah menjadi tempat berbagi suka dan duka dalam masa perkuliahan. Semoga kebahagiaan dan kesuksesan selalu bersama kita.

11. Temanku Hikmah, Sari Oja, Hasnani, Sartini Rusli, dan Kuasa Sari, semoga kita bisa sukses menggapai mimpi kita masing-masing.
12. Juwita Pratiwi Lukman, S.IP. dan Andi Nurul Afana Fitrah, S.IP, Fauziah Nurhidayah, atas doa dan dukungannya selama ini.
13. Kepada Lurah Belawa Bapak Abd. Kadir dan Keluarga, semoga senantiasa dilindungi dan diberikan kebahagiaan.
14. Teman-teman KKN Kelurahan Belawa Aswin, Hanif Patiroy, Andi Ardi Wardiman, Abd. Akram, Sari Rajwani Artika, Sri Wahyuni Muhsin, dan Siti Surya Rahmi.
15. Kepada Kakanda Samang, SH., (Alm) Sumange, SH., Yunus SH., Sumardi, SH., dan Sri Suhasti, S.Si terima kasih untuk semua bantuan yang telah diberikan selama ini.
16. Keluarga besar UKM LP2KI FH-UH, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis.
17. Keluarga besar UKM KPI Universitas Hasanuddin, terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang telah diberikan kepada penulis.
18. Teman-teman Angkatan 2013 SMAN 1 Tellu Limpoe, Khususnya teman-teman IPS BERSATU terima kasih untuk semuanya. Doa terbaik untuk kalian semua.
19. Kepada semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan, terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan bantuan dalam bentuk apapun

yang selama ini telah diberikan kepada Penulis. Semoga Tuhan membalas kebaikan budi kalian.

Demikianlah ucapan terima kasih yang dapat penulis sampaikan, penulis berharap semoga apa yang penulis sajikan dalam skripsi ini ada manfaatnya dan semoga ilmu yang penulis peroleh di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dapat juga berguna dan bermanfaat bagi banyak orang, agama, bangsa dan negara, Amin. Atas segala ucapan yang tidak berkenan dalam skripsi ini penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya.

Terima kasih,

Makassar, 04 April 2017

UNI ANDIRA A

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
ABSTRAK	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	11
A. Pengertian Pidana.....	11
B. Teori Tujuan Pemidanaan.....	13
C. Pembinaan Narapidana	18
1. Ruang Lingkup Pembinaan.....	19
2. Tahap Pelaksanaan Pembinaan.....	24
3. Asas – Asas Pembinaan Narapidana	26
4. Prinsip – Prinsip Bimbingan dan Pembinaan.....	28
5. Metode Pembinaan.....	30
D. Sistem Pemasyarakatan	34
E. Rumah Tahanan Negara.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	47
A. Lokasi Penelitian	47
B. Pupulasi dan Sampel	47
C. Jenis dan Sumber Data.....	47
D. Teknik Pengumpulan Data.....	48

E. Analisis Data	49
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	50
A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidrap.....	50
1. Gambaran Umum Rutan Klas IIB Sidrap	50
2. Bentuk – Bentuk Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rutan Klas IIB Sidrap	64
3. Penerapan UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana.....	80
4. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembimbingan dan Pembinaan warga Binaan	81
B. Faktor Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Pembinaan di Rutan Klas IIB Sidrap	84
BAB V PENUTUP	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA.....	91
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Pegawai Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidrap.....	52
Tabel 4.2 Data Penghuni dan Kapasitas Periode 2012-2016 Rutan Klas IIB Sidrap	57
Tabel 4.3 Daftar Isi Rutan Menurut Status dan Sex.....	59
Tabel 4.4 Daftar Isi Rutan Menurut Status dan jenis Kejahatan	60
Tabel 4.5 Daftar Isi Penghuni Kasus Narkoba Rutan Klas IIB Sidrap Januari 2017.....	62
Tabel 4.6 Daftar Penghuni Menurut Agama.....	62
Tabel 4.7 Data Penghuni Rutan Klas IIB Sidrap Berdasarkan Pendidikan.....	63
Tabel 4.8 Daftar Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rutan Klas IIB Sidrap	66
Tabel 4.9 Daftar Narapidana yang Mengikuti Program Pembinaan Paket A	72

DAFTAR ARTI LAMBANG DAN SINGKATAN

LAMBANG/ SINGKATAN	ARTI
LAPAS	Lembaga Pemasyarakatan
BAPAS	Balai Pemasyarakatan
RUTAN	Rumah Tahanan Negara
SIDRAP	Sidenreng Rappang
WBP	Warga Binaan Pemasyarakatan
Napi	Narapidana
KUHP	Kitab Undang Undang Hukum Pidana
KUHAP	Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana
PP RI No. 31 Tahun 1999 tentang Pembimbingan dan Pembinaan Warga Binaan	Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembimbingan dan Pembinaan Warga Binaan
UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan	Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
PIDUM	Pidana Umum
PIDSUS	Pidana Khusus
3R dan 1D	<i>Reformation, Restraint, Restribution, dan Deterrence</i>
KADARKUM	Keluarga Sadar Hukum
PEKA	Persuasif, Edukatif, Komunikatif, dan Akomodatif.
HAM	Hak Asasi Manusia
UPT	Unit Pelaksana Teknis
KARPEG	Kartu Pegawai
KARIS	Kartu Istri
KARSU	Kartu Suami
ASKES	Asuransi Kesehatan
TASPEN	Tabungan Asuransi dan Pensiun

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum pidana merupakan suatu aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.¹ Hukum pidana itu bersifat publik artinya hukum pidana mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat hukum umumnya guna untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hukum pidana menunjukkan adanya suatu perbedaan dari hukum-hukum yang lain pada umumnya, yaitu bahwa didalamnya orang mengenal adanya suatu kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu *bijzondere leed* atau suatu penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang

¹ Eddy O.S. Hiariej, 2014, Prinsip Prinsip Hukum Pidana, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 4

telah ditentukan didalamnya.² Pemberian hukuman merupakan akibat hukum dari suatu perbuatan melanggar hukum yang berlaku. Tujuan dari pemberian hukuman atau sanksi kepada seseorang yang melanggar ketentuan hukum pidana ialah untuk memberikan efek jera kepada pelaku agar tidak mengulangi lagi perbuatannya dan kepada masyarakat untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Selanjutnya oleh **Hoefnagles** bahwa pemberian sanksi merupakan suatu proses pembangkitan semangat (*encouragement*) dan pencelaan (*censure*) untuk tujuan agar seseorang berorientasi atau menyesuaikan diri dengan suatu norma atau undang-undang yang berlaku.³ Dengan pemberian sanksi tersebut, diharapkan pelaku dapat menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri serta dapat kembali ke masyarakat.

Dalam penerapan hukuman di Indonesia, hukum pidana mengenal adanya pidana penjara yang merupakan salah satu jenis hukuman yang diterapkan dalam sanksi pidana. Pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana terdapat dua bentuk penjatuhan pidana atau pembedaan yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Selanjutnya pidana tambahan yang terdiri dari pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Dalam pelaksanaan pidana atau pembedaan terhadap pelaku

² Lamintang, Franciscus Theo Junior Lamintang, 2014, Dasar Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 16-17

³ Dwidja Priyatno, 2013, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesi, PT Refika Aditama, Bandung, hal.9

dapat dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan hukum tetap.

Pidana merupakan pemberian nestapa atau penderitaan yang diberikan oleh negara kepada pelaku kejahatan. Pidana dapat dijatuhkan kepada pelaku melalui proses hukum yang berlaku. Tahap penjatuhan pidana dimulai dari proses penetapan pelaku jadi tersangka berdasarkan alat bukti yang sah oleh penyidik. Kemudian peningkatan status tersangka menjadi terdakwa dalam pemeriksaan perkara di pengadilan. Sehingga berdasarkan putusan pengadilan bahwa terdakwa dapat dijatuhkan pidana karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal tersebut termaktub dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Berdasarkan putusan pengadilan tersebut, sehingga status terdakwa berubah menjadi terpidana. Kemudian terpidana yang menjalankan masa pidananya di Lembaga Pemasyarakatan disebut Narapidana.

Pelaksanaan masa pidana oleh terpidana pada awalnya dilakukan dengan pidana penjara. Pidana penjara menurut **Andi Hamzah** adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara, tetapi juga berupa pengasingan, misalnya, pada zaman kolonial di Indonesia dikenal juga sistem pengasingan yang didasarkan pada hak istimewa Gubernur Jendral (*exorbitante*), misalnya pengasingan Hatta dan Syahrir ke Boven

Digoel kemudian ke Neira, pengasingan Soekarno ke Ende kemudian ke Bengkulu.⁴

Pidana penjara yang merupakan pidana kehilangan kemerdekaan, nyatanya menjadi pilihan utama bagi hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Hal tersebut dikarenakan pidana penjara yang dipandang paling efektif dalam memberikan rasa jera kepada pelaku. Penjara dianggap sebagai sarana pembalasan terhadap pelaku, agar pelaku dapat menyadari perbuatannya dan tidak lagi mengulangnya.

Pandangan pidana penjara sebagai sebuah pembalasan terhadap perbuatan terpidana seiring berjalannya waktu dianggap tidak lagi efektif dilaksanakan. Karena hukum positif yang berlaku mengakui Hak Asasi Manusia (HAM), sehingga dipandang bahwa terpidana memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan kembali ke lingkungan masyarakat setelah menjalani masa pidananya, olehnya orientasi dari pemidaan tidak hanya sekedar pembalasan, tetapi bagaimana terpidana dapat dibina untuk menyadari kesalahannya dan memperbaiki diri. Bertolak dari pandangan **Suhardjo** tentang hukum sebagai pengayoman. Hal ini membuka alasan perlakuan terhadap narapidana dengan cara pemasyarakatan sebagai tujuan pidana penjara.⁵

Berdasarkan atas pandangan tersebut, sehingga pada tanggal 27 April 1964 konsep pemasyarakatan disempurnakan oleh Keputusan Konfrensi Dinas Para Pemimpin Kopenjaraan yang memutuskan bahwa

⁴ *Ibid.* hal. 72

⁵ *Ibid.* hal 97

pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilaksanakan dengan sistem pemasyarakatan sebagai arah tujuan, membimbing, dan membina. Dari hasil keputusan konfrensi tersebut, sehingga pidana penjara telah memiliki fungsi lain, yaitu pidana penjara tidak lagi berfungsi sebagai sarana pembalasan, tetapi sebagai pembinaan terhadap narapidana dengan menerapkan sistem pemasyarakatan. Pembinaan terhadap narapidana dijadikan sebagai dasar dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan, yang dapat dilakukan di dalam Lembaga Pemasyarakatan setelah adanya putusan pengadilan. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Transformasi pembinaan bagi narapidana dari sistem penjara menjadi sistem pemasyarakatan berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut dengan Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan”. Pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan selain diharapkan dapat membina kembali narapidana, juga diharapkan dapat mengurangi angka tingkat kejahatan di Indonesia. Tujuan memberikan efek jera kepada narapidana dengan merampas kebebasan dan menempatkannya di dalam Lapas diharapkan menjadi pembelajaran bagi diri narapidana secara khusus dan bagi masyarakat secara umum.

Pelaksanaan pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan pada kenyataannya belum dapat diterapkan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan karena peningkatan jumlah narapidana yang tidak sebanding dengan jumlah Lapas yang ada, sehingga menimbulkan kelebihan kapasitas di dalam Lapas. Hal tersebut jelas menjadi hambatan dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana.

Berdasarkan sistem *database* pemasyarakatan mencatat, peningkatan angka tahanan dan narapidana terjadi tiap tahunnya, meskipun jumlah Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan kapasitas juga bertambah, namun tentu saja tidak dapat membendung lonjakan penghuni Rutan dan Lapas. Tercatat pada Desember 2012 terdapat 440 UPT dengan kapasitas penghuni mencapai 102.040 orang, jumlah narapidana dan tahanan mencapai 150.688 orang, mengakibatkan *over* kapasitas mencapai 148%. Angka tersebut kemudian meningkat sampai dengan Desember 2013, dengan peningkatan jumlah UPT mencapai 459 UPT, *over* kapasitas tetap terjadi dan meningkat menjadi 149%. Angka *over* kapasitas sebesar 149% bertahan di Desember 2014, meskipun terjadi penambahan UPT menjadi 463 dan kapasitas menjadi 109.573 penghuni. Pada data terakhir melalui SDP Ditjen Pas, Januari 2015, *over* kapasitas meningkat menembus angka 150%, hal tersebut dikarenakan jumlah

penghuni Rutan dan Lapas yang mencapai 164.859 orang, berbanding kapasitas 464 UPT yang hanya mampu menampung 110.098 penghuni.⁶

Kelebihan kapasitas yang terjadi menyebabkan pembinaan narapidana yang tidak efektif sehingga dewasa ini pembinaan narapidana tidak hanya dilakukan di Lapas tetapi juga dilakukan di Rumah Tahanan Negara atau yang biasa disebut Rutan. Rutan dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) merupakan tempat tersangka atau terdakwa di tahan selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan di Indonesia. Saat ini telah banyak Rutan yang menjadi tempat pembinaan bagi narapidana dikarenakan kelebihan kapasitas di Lapas dan di beberapa daerah Kabupaten/Kota belum tersedia Lapas untuk pembinaan narapidana, meskipun berdasarkan pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan bahwa Lapas dan Bapas didirikan di setiap ibukota kabupaten atau kotamadya. Sedangkan pada Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM.01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara.

Pembinaan Narapida yang dilaksanakan di Rutan dapat menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan pembinaan narapidana, mengingat selain narapidana, Rutan merupakan tempat bagi tahanan atau tersangka yang dalam proses penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di Pengadilan. Sehingga penempatan narapidana di dalam

⁶ <http://www.hukumpedia.com/erasmus70/over-kapasitas-lapas-dan-rutan-jumlah-penghuni-dan-masalah-utama> diakses pada 17/11/16. pukul. 22.15 Wita

Rutan dapat pula menyebabkan kelebihan kapasitas di dalam Rutan. Kelebihan Kapasitas akibat penempatan narapidana di dalam Rutan dapat di lihat terjadi di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidrap yang merupakan tempat bagi tahanan sekaligus narapidana yang menjalani masa pidana.

Catatan selama 2015, sedikitnya sudah ada 1.500 narapidana (Napi) terdaftar menjadi warga binaan di Rutan Klas IIB Sidrap yang berdomisili di jalan Irigasi Galug Aserae, Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae. Rata-rata, jumlah penghuni setiap bulannya meningkat. Bahkan setiap harinya, selalu saja ada penambahan tahanan 10 hingga 15 orang.⁷

Menurut **Mansyur** Kepala Rutan Klas IIB Sidrap bahwa “Jumlah tahanan selalu *over* kapasitas, hal ini disebabkan tingginya angka kriminal yang diungkap Polres di wilayah Sidrap. Rata-rata setiap bulannya ada 250 orang tahanan kita bina”. Menurutnya, data dipembinaan Napi tercatat hingga 31 Desember 2015 sedikitnya ada 243 orang tahanan dibina termasuk tahanan titipan Kejaksaan dan Polres Sidrap. Terdiri tahanan kasus Narkoba 139 orang dan kasus pidana umum (pidum) 104 orang.⁸

Berdasarkan data dari Daftar Kekuatan Isi Rutan Sidrap tanggal 4 November 2016 bahwa jumlah Tahanan di Rutan Klas IIB Sidrap sebanyak 68 orang sedangkan Jumlah Narapidana sebanyak 267 orang. Melihat

⁷ file:///C:/Users/ASUS%20PC/Documents/jurnal/Rutan%20Sidrap%20Sudah%20Layak%20Jadi%20Lapas%20%E2%80%93%20Berita%20Kota%20Makassar.htm. Diakses pada 03/12/2016. Pukul 21.25 Wita

⁸ *Ibid.*

kenyataan yang ada bahwa jumlah narapidana yang lebih banyak daripada jumlah tahanan. Pada kenyataannya dalam Rutan Klas IIB Sidrap telah mengalami kelebihan kapasitas yang dapat mempengaruhi pelaksanaan pembinaan narapidana.

Berdasarkan Hal tersebut, maka Penulis tertarik untuk mengangkat judul skripsi tentang **“Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara (Studi di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidrap)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada Latar Belakang Masalah di atas, maka dirumuskanlah beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pelaksanaan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidrap?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidrap?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidrap.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidrap.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan dari penelitian ini, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Menjadi bahan pertimbangan bagi Pemerintah setempat dalam meningkatkan status Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidrap menjadi Lembaga Pemasyarakatan.
2. Menjadi bahan masukan bagi petugas Rutan dalam melaksanakan perawatan terhadap tahanan dan Pembinaan terhadap narapidana.
3. Sebagai referensi untuk mahasiswa Fakultas Hukum khususnya bagian Hukum Pidana maupun mahasiswa bagian sosial dalam rangka penelitian atau penulisan selanjutnya.
4. Dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang berminat (pemerhati/peneliti) pada khususnya dalam memahami dan mengetahui bagaimana pelaksanaan narapidana di dalam Rutan.
5. Bagi penulis sendiri akan menambah pengetahuan dan pemahaman penulis mengenai pelaksanaan pembinaan narapidana yang dilakukan di Rutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pidana

Pidana pada hakikatnya adalah suatu kerugian berupa penderitaan yang sengaja diberikan oleh negara terhadap individu yang melakukan pelanggaran terhadap hukum.⁹ Sehubungan dengan pengertian pidana **Roeslan Saleh**, mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan pidana ialah reaksi atas delik dan ini berwujud suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu.¹⁰ Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), pidana sebagai reaksi atas delik yang dijatuhkan harus berdasarkan pada vonis hakim melalui sidang peradilan atas terbuhtinya perbuatan pidana yang dilakukan.¹¹

Menurut **Van Hamel**, arti dari pidana atau straf menurut hukum positif dewasa ini adalah:¹²

Een bijzonder leed, tagen den overtreder van een door den staat gehandhaafd rechtsvoorschrift, ap den enkelen grond van die overtrading, van wege den staat als handhaver der openbare rechtsorde, door met met de rechtsbedeeling belasta gezag uit te spreken.

Artinya:

Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama

⁹ Eddy O.S. Hiariej, *Op.cit.*, hal.385

¹⁰ Bambang Waluyo, 2014, Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, hal.9

¹¹ *Ibid.*, hal. 100

¹² P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, 2012, Hukum Panitensier Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 33

negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.

Menurut ketentuan di dalam pasal 10 Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Pidana Pokok dan Pidana tambahan sebagai berikut:

Pidana Pokok terdiri dari:

- a. Pidana Mati
- b. Pidana Penjara
- c. Pidana Kurungan
- d. Pidana denda
- e. Pidana tutupan

Adapun pidana tambahan dapat berupa:

- a. Pencabutan dari hak-hak tertentu
- b. Penyitaan dari benda-benda tertentu
- c. Pengumuman dari putusan hakim.

Pada perkembangannya, dewasa ini pidana penjara menjadi pilihan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dalam proses pengadilan. Pidana penjara dipandang dapat memberikan efek jera kepada para pelaku kejahatan, meskipun pelaksanaan pidana penjara telah berorientasi pada sistem pemasyarakatan. Pidana penjara sebagai pemberian nestapa atau penderitaan kepada pelaku kejahatan dengan merampas kemerdekaan atau kebebasan bergerak diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi pelaku itu sendiri maupun masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan pada hal tersebut adapun dari tujuan pidana dalam literatur bahasa inggris biasa disebut dengan tiga R dan satu D yaitu *Reformation* (Reformasi) berarti memperbaiki atau merehabilitasi penjahat

menjadi orang baik dan berguna bagi masyarakat, *Restraint* berarti mengasingkan pelanggar dari masyarakat, dan *Restribution* ialah pembalasan terhadap pelanggar karena telah melakukan kejahatan, sedangkan satu D adalah *Deterrence* yang terdiri atas *individual deterrence* (pencegahan khusus) dan *general deterrence* (pencegahan umum) berarti menjerakan atau mencegah sehingga baik terdakwa sebagai individu maupun orang lain yang potensial menjadi penjahat akan jera atau takut melakukan kejahatan, melihat pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa.

B. Tujuan Pemidanaan

Wesley Cragg menyatakan bahwa ada empat hal terkait pemidanaan dalam masyarakat modern yaitu:¹³

- (1) Pemidanaan adalah sesuatu yang dapat dimengerti dan tidak dapat dihindari oleh masyarakat modern.
- (2) Pelaksanaan pemidanaan adalah refleksi sistem peradilan pidana yang berevolusi dan jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan tidak terlepas dari tipe dan karakter perbuatan pidana yang dilakukan. Tegasnya, ada hubungan yang erat antara perbuatan pidana dan pemidanaan itu sendiri. *Culpae poena par esto* (hukuman harus setimpal dengan kejahatan).
- (3) Pelaksanaan pidana harus mengalami reformasi yang signifikan dengan merujuk pada pelaksanaan pidana di Eropa Barat dan Amerika Utara.
- (4) Sejumlah pemidanaan yang digunakan harus menyediakan kriteria untuk mengevaluasi apakah pelaksanaan pidana tersebut sudah sesuai dengan tujuan dari pidana itu sendiri. Apakah pidana yang diterapkan perlu direformasi menuju perbaikan.

Pidana dan pidana dalam Rancangan KUHP pada BAB III yang berjudul Pemidanaan, Pidana dan Tindakan. Dalam bab tersebut

¹³ Eddy O.S. Hiariej, *Loc.cit.*, hal.385-386

dikatakan bahwa tujuan pidana ialah: **Pertama**, mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat. **Kedua**, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna. **Ketiga**, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat. **Keempat**, membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Berdasarkan uraian tersebut, adapun teori tujuan pidanaan antara lain:

a. Teori Absolut atau Teori Pembalasan

Andi Hamzah mengemukakan teori pembalasan yaitu:¹⁴

“Pembalasan (*Vergelding*) oleh banyak orang dikemukakan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan. Kepuasan hatilah yang dikejar lain tidak.

Apabila ada seseorang oknum yang langsung kena atau menderita karena kejahatan, maka kepuasan hati itu terutama ada pada si oknum itu. Dalam hal pembunuhan, kepuasan hati ada pada keluarga si korban khususnya dan masyarakat umumnya”.

Ibarat pribahasa yang menyebutkan “darah bersabung darah, nyawa bersabung nyawa. Utang pati nyaur pati, utang lara nyaur lara” (si pembunuh harus di bunuh, si penganiaya harus dianiaya).

Selanjutnya, menurut **R. Soesilo** bahwa:¹⁵

“pidana adalah suatu pembalasan berdasar atas keyakinan zaman kuno, bahwa siapa yang membunuh harus di bunuh. Dasar keyakinan ini adalah “*TALIO*” atau “*Q/SOS*” di mana orang yang

¹⁴ Tolib Setiady, 2010, Pokok-Pokok Hukum Panitensier di Indonesia, Alfabeta, Bandung, hal. 53)

¹⁵ *Ibid.*, hal. 53-54

membunuh itu harus menebus dosanya dengan jiwanya sendiri. Ini berarti bahwa kejahatan itu sendirilah yang memuat unsur menutut dan membenarkan di jatuhkannya pidana.”

Jadi, pidana di sini dimaksudkan semata-mata hanya untuk memberikan penderitaan kepada orang yang melakukan kejahatan.

Pada dasarnya tindakan pembalasan itu mempunyai dua sudut, yaitu:

- 1) Sudut subjektif (*subjectieve vergelding*) yang pembalasan ditujukan kepada orang lain yang berbuat salah
- 2) Sudut objektif (*objectieve vergelding*) yang pembalasannya ditujukan untuk memenuhi perasaan balas dendam masyarakat.

Selanjutnya **Karl O. Christiansen** memberi ciri pokok atau karakteristik pada teori absolut atau teori pembalasan:¹⁶

- a) Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan.
- b) Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat.
- c) Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana.
- d) Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar.
- e) Pidana melihat kebelakang, ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

b. Teori Relatif atau Teori Tujuan

Menurut teori relatif (*relatieve theoriem*) atau teori tujuan (*utilitarian theoriem*) menyatakan “pidana itu bukanlah untuk melakukan pembalasan kepada pembuat kejahatan, melainkan mempunyai tujuan-tujuan tertentu

¹⁶ Dwidja Priyatno. *Op.cit.*, hal.26

yang bermanfaat”. (dengan demikian dasar pembenaran pidana menurut teori ini terletak pada tujuan pembedaan itu sendiri).¹⁷

Berdasarkan hal tersebut, **Muladi** dan **Barda Nawawi Arief** menyatakan bahwa:¹⁸

“pidana dijatuhkan bukan *quia peccatum est* (karena orang membuat kejahatan) melainkan *ne peccatum* (supaya orang jangan melakukan kejahatan)”.

Mengenai tujuan pidana itu ada beberapa pendapat, yaitu:¹⁹

- 1) Tujuan pidana adalah untuk menentramkan masyarakat yang gelisah karena akibat dari telah terjadinya kejahatan.
- 2) Tujuan pidana adalah untuk mencegah kejahatan yang dapat dibedakan atas Pencegahan Umum (*Generale Preventie*) dan Pencegahan Khusus (*Speciale Preventie*)

Mengenai Pencegahan Umum (*Generale Preventie*) dan Pencegahan Khusus (*Speciale Preventie*) **Andi Hamzah**, menyatakan bahwa:²⁰

“Untuk itu terkenal adagium latin *nemo prudens punit quia peccatum, sed ne peccetur* (supaya khalayak ramai betul-betul takut melakukan kejahatan, maka perlu pidana yang ganas dan pelaksanaannya dimuka umum)”.

“prevensi khusus yang dianut oleh **Van Hamel** (Belanda) dan **Von List** (Jerman) mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggaran guna mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggaran melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya”.

¹⁷ Tolib Setiady. *Op.cit.*, hal. 56

¹⁸ Dwidja Priyatno. *Loc.cit.*

¹⁹ Tolib Setiady. *Loc.cit.*

²⁰ *Ibid.*, hal. 57

Selanjutnya **Karl O. Christiansen** memberi ciri pokok atau karakteristik pada teori relatif atau teori tujuan:²¹

- a) Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*).
- b) Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat.
- c) Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *Culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
- d) Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kesehatan.
- e) Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif), pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur tujuan ataupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

c. Teori gabungan

Teori gabungan (*Verenegings Theorieen*) (*Gemengde Theorieen*) merupakan gabungan dari teori absolut atau teori pembalasan dengan teori relatif atau teori tujuan. Teori gabungan ini dapat dibagi kedalam 3 (tiga) golongan yaitu:²²

- 1) Teori gabungan yang menitikberatkan kepada pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melebihi daripada yang diperlukan dalam mempertahankan ketertiban masyarakat.

Pompe menyatakan bahwa:

Menitikberatkan pidana pada pembalasan tetapi tindak pidana itu harus pula bermaksud mempertahankan ketertiban masyarakat agar kepentingan umum dapat diselamatkan.

²¹ Dwidja Priyatno. *Op.cit.*, hal.25

²² Tolib Setiady. *Op.cit.*, hal.59

- 2) Teori gabungan yang menitikberatkan kepada pertahanan ketertiban masyarakat, tetapi pidana tidak boleh lebih berat daripada beratnya penderitaan yang sesuai dengan beratnya perbuatan si terpidana.

Simons yang merupakan penganut dari teori ini berpendapat bahwa:

Primer pidana adalah prevensi umum, dan dasar skunder pidana adalah prevensi khusus. Prevensi itu harus memuat unsur-unsur menakutkan, memperbaiki dan membinasakan. Selanjutnya dasar ketiga pidana adalah harus sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat.

- 3) Teori gabungan yang menitikberatkan sama baik kepada pembalasan maupun kepada pertahanan ketertiban masyarakat.

Adapun perbedaan pidana dari masing-masing teori hukum pidana (*strafrechts theorieen*) ialah pada teori pembalasan, pidana itu melihat kepada masa lalu oleh karena teori ini beranggapan bahwa kejahatan sebagai perbuatan yang tidak adil yang menimbulkan penderitaan pada orang yang terkena kejahatan. Oleh karena itu, penderitaan itu harus ditiadakan dengan cara menjatuhkan pidana pada penjahatnya.

C. Pembinaan Narapidana

Pengertian pembinaan menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan. Pembinaan narapidana merupakan serangkaian proses yang dilakukan berdasarkan sistem

pemasyarakatan untuk membentuk narapidana menjadi pribadi yang lebih baik. Pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan sistem pemasyarakatan yang diatur dalam UU No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan serta Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.

1. Ruang Lingkup Pembinaan

Pembinaan narapidana berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan pada pasal 2 menyatakan bahwa:

- (1) Program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian.
- (2) Program pembinaan diperuntukkan bagi Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

Selanjutnya dalam pasal 3 ditentukan bahwa:

Pembinaan dan penimbangan kepribadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran berbangsa dan bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan perilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;
- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja; dan;
- i. Latihan kerja dan produksi

Lebih lanjut tentang pembinaan narapidana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02.-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia yang di atur dalam Bab VII tentang Pelaksanaan Pembinaan sebagai berikut:

“fungsi dan tugas pembinaan pemasyarakatan terhadap warga binaan pemasyarakatan (narapidana, anak negara, klien pemasyarakatan, dan tahanan) dilaksanakan secara terpadu dengan tujuan agar mereka setelah selesai menjalani pidananya, pembinaannya dan bimbingannya dapat menjadi warga masyarakat yang baik.

Sebagai abdi negara dan abdi masyarakat wajib menghayati serta mengamalkan tugas-tugas pembinaan pemasyarakatan dengan penuh tanggung jawab. Untuk melaksanakan kegiatan pembinaan pemasyarakatan yang berdaya guna, tepat guna, dan berhasil guna, petugas harus memiliki kemampuan profesional dan integrasi moral.”

Berdasarkan hal tersebut maka ruang lingkup dalam pembinaan narapidana yang di bagi dalam dua (2) bidang yaitu:

a. Pembinaan Kepribadian yang meliputi:

1) Pembinaan Kesadaran Beragama

Usaha ini diperlukan agar dapat diteguhkan imannya terutama memberi pengertian agar warga binaan pemasyarakatan dapat menyadari akibat-akibat dari perbuatan-perbuatan yang benar dan perbuatan-perbuatan yang salah.

2) Pembinaan Berbangsa dan Bernegara

Usaha ini dilaksanakan melalui P.4 (Pedoman, Penghayatan, dan pengamalan Pancasila) termasuk menyadarkan mereka agar dapat

menjadi warga negara yang baik yang dapat berbakti bagi bangsa dan negaranya. Perlu disadarkan bahwa berbakti untuk bangsa dan negara adalah sebagian dari iman (taqwa).

3) Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan)

Usaha ini diperlukan agar pengetahuan serta kemampuan berfikir warga binaan pemasyarakatan semakin meningkat sehingga dapat menunjang kegiatan-kegiatan positif yang diperlukan selama masa pembinaan.

Pembinaan intelektual (kecerdasan) dapat dilakukan baik melalui pendidikan formal maupun melalui pendidikan non formal. Pendidikan formal, diselenggarakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah ada yang ditetapkan oleh pemerintah agar dapat ditingkatkan semua warga binaan pemasyarakatan.

Pendidikan nonformal, diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan melalui kursus-kursus, latihan keterampilan, dan sebagainya. Bentuk pendidikan nonformal yang paling mudah dan paling murah ialah kegiatan-kegiatan ceramah umum dan membuka kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh informasi dari luar, misalnya membaca koran/majalah, menonton TV, mendengar radio, dan sebagainya. Untuk mengejar ketertinggalan di bidang pendidikan baik formal maupun non formal agar di upayakan cara belajar melalui Program Kejar Paket A dan Kejar Usaha.

4) Pembinaan Kesadaran Hukum

Pembinaan kesadaran hukum warga binaan pemasyarakatan dilaksanakan dengan memberikan penyuluhan hukum yang bertujuan untuk mencapai kadar kesadaran hukum yang tinggi sehingga sebagai anggota masyarakat, mereka menyadari hak dan kewajibannya dalam rangka turut menegakkan hukum dan keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum dan terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia yang taat kepada hukum. Penyuluhan hukum bertujuan lebih lanjut untuk membentuk keluarga sadar hukum (KADARKUM) yang dibina selama berada dalam lingkungan pembinaan maupun setelah berada kembali di tengah-tengah masyarakat.

Penyuluhan hukum diselenggarakan secara langsung yakni penyuluh berhadapan langsung dengan sasaran yang disuluh dalam TEMU SADAR HUKUM dan SAMBUNG RASA, sehingga dapat bertatap muka langsung, misalnya melalui ceramah, diskusi, sarasehan, temuwicara, peragaan, dan simulasi hukum. Metode pendekatan yang diutamakan ialah metode persuasif, edukatif, komunikatif, dan akomodatif (PEKA).

5) Pembinaan Mengintegrasikan Diri dengan Masyarakat.

Pembinaan di bidang ini dapat dikatakan juga pembinaan kehidupan sosial kemasyarakatan, yang bertujuan pokok agar bekas narapidana mudah diterima kembali oleh masyarakat lingkungannya.

Untuk mencapai ini, kepada mereka selama dalam Lembaga Pemasyarakatan dibina terus untuk patuh beribadah dan dapat melakukan usaha-usaha sosial secara gotong royong, sehingga pada waktu mereka kembali ke masyarakat mereka telah memiliki sifat-sifat positif untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan masyarakat lingkungannya.

b. Pembinaan Kemandirian.

Pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program:

- 1) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, misalnya kerajinan tangan, industri, rumah tangga, reparasi mesin dan alat-alat elektronika dan sebagainya.
- 2) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, misalnya pengelolaan bahan mentah dari sektor pertanian dan bahan alam menjadi bahan setengah jadi dan jadi (contoh mengolah rotan menjadi perabot rumah tangga, pengolahan makanan ringan berikut pengawetannya, dan pembuatan batu bata, genteng, batako.
- 3) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakatnya masing-masing.

Dalam hal ini bagi mereka yang memiliki bakat tertentu diusahakan pengembangan bakatnya itu. Misalnya memiliki kemampuan di bidang seni, maka diusahakan untuk disalurkan ke perkumpulan-

perkumpulan seniman untuk dapat mengembangkan bakatnya sekaligus mendapatkan nafkah.

- 4) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi, misalnya industri kulit, industri pembuatan sepatu kualitas ekspor, pabrik tekstil, industri minyak atsiri dan usaha tambak udang.

2. Tahap Pelaksanaan Pembinaan Narapidana

Tahapan pelaksanaan pembinaan narapidana lebih lanjut diatur dalam Bab II Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Pembinaan narapidana dilaksanakan melalui beberapa tahap pembinaan
- (2) Tahap pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) tahap, yaitu:
 - a. Tahap awal;
 - b. Tahap lanjutan;
 - c. Tahap akhir.
- (3) Pengalihan pembinaan dari satu tahap ke tahap lain ditetapkan melalui sidang tim Pengamat Pemasyarakatan berdasarkan data dari Pembina Pemasyarakatan, Pengaman Pemasyarakatan, Pembimbingan Kemasyarakatan, dan Wali Narapidana.
- (4) Data sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) merupakan hasil pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.
- (5) Ketentuan mengenai pengamatan, penilaian, dan laporan terhadap pelaksanaan pembinaan.

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan pembinaan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan disediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

- (2) LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibagi dalam beberapa klasifikasi dan spesifikasi.
- (3) Ketentuan mengenai klasifikasi dan spesifikasi LAPAS sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Pasal 9

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 (2) huruf a bagi narapidana dimulai sejak yang bersangkutan berstatus sebagai narapidana sampai dengan $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) dari masa pidana.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. Tahap lanjutan pertama, sejak berakhirnya pembinaan tahap awal sampai dengan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari masa pidana; dan
 - b. Tahap lanjutan kedua, sejak berakhirnya pembinaan tahap lanjutan pertama sampai dengan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c dilaksanakan sejak berakhirnya tahap lanjutan sampai dengan berakhirnya masa pidana dari narapidana yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Pembinaan tahap awal sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) meliputi:
 - a. Masa pengamatan, pengenalan dan penelitian lingkungan paling lama satu (1) bulan;
 - b. Perencanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian;
 - c. Pelaksanaan program pembinaan kepribadian dan kemandirian; dan
 - d. Penilaian pelaksanaan program pembinaan tahap awal.
- (2) Pembinaan tahap lanjutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) meliputi:
 - a. Perencanaan program pembinaan lanjutan;
 - b. Pelaksanaan program pembinaan lanjutan;
 - c. Penilaian pelaksanaan program pembinaan lanjutan; dan
 - d. Perencanaan dan pelaksanaan program asimilasi.
- (3) Pembinaan tahap akhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (3) meliputi:
 - a. Perencanaan program integrasi;
 - b. Pelaksanaan program integrasi; dan
 - c. Pengakhiran pelaksanaan pembinaan tahap akhir.
- (4) Pentahapan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) ditetapkan melalui sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan.
- (5) Dalam sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan kepala LAPAS wajib memperhatikan hasil lintas.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan jenis kegiatan program pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri.

Pasal 11

- (1) Pembinaan tahap awal dan tahap lanjutan dilaksanakan di Lapas
- (2) Pembinaan tahap akhir dilaksanakan diluar Lpas oleh BAPAS.
- (3) Dalam hal narapidana tidak memenuhi syarat-syarat tertentu pembinaan tahap akhir narapidana yang bersangkutan tetap dilaksanakan di Lapas.

Pasal 12

Dalam hal terdapat narapidana yang tidak dimungkinkan memperoleh kesempatan asimilasi dan atau integrasi, maka narapidana yang bersangkutan diberikan pembinaan khusus.

3. Asas-asas Pembinaan Narapidana

Pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan pada sistem pemasyarakatan berdasarkan asas-asas yang diatur dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan sebagai berikut:

a. Pengayoman.

Pengayoman adalah perlakuan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh Warga Binaan Pemasyarakatan, juga memberikan bekal hidupnya kepada Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi warga yang berguna bagi masyarakat.

b. Persamaan perlakuan dan pelayanan.

Persamaan perlakuan dan pelayanan adalah pemberian perlakuan dan pelayanan yang sama kepada Warga Binaan Pemasyarakatan tanpa membedakan orang-orang.

c. Pendidikan.

Pendidikan adalah bahwa penyelenggaraan pendidikan dan bimbingan dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain penanaman jiwa, kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.

d. Penghormatan harkat dan martabat manusia.

Penghormatan harkat dan martabat manusia adalah bahwa sebagai orang yang tersesat Warga Binaan Pemasyarakatan harus tetap diperlakukan sebagai manusia.

e. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.

Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan adalah Warga Binaan Pemasyarakatan harus berada dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, sehingga mempunyai kesempatan penuh untuk memperbaikinya. Selama di Lapas, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-haknya yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan, keterampilan, olah raga, atau rekreasi.

f. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu adalah bahwa walaupun Warga Binaan Pemasyarakatan berada di Lapas, tetapi harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan

masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat, antara lain berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lapas dari anggota masyarakat yang bebas, dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

Pembinaan narapidana dengan berdasarkan pada asas sistem pemasyarakatan diharapkan narapidana selama menjalankan masa pidananya dapat menjadi lebih baik sehingga nantinya dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka dalam Pasal 3 UU No.12/1995 dinyatakan bahwa “fungsi sistem pemasyarakatan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

4. Prinsip-Prinsip Bimbingan dan Pembinaan

Demi tercapainya tujuan dalam pembinaan narapidana maka, pembinaan narapidana dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip untuk bimbingan dan pembinaan sebagai berikut:²³

1. Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.

²³ Dwidja Priyatno., *Op.cit.*, hal. 98-99

4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja, pekerjaan yang diberikan harus ditunjukan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat tidak boleh ditujukan kepada narapidana bahwa itu penjahat.
9. Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.

Bentuk pola pembinaan bagi narapidana menurut pola pembinaan narapidana/tahanan meliputi:

1. Pembinaan berupa interaksi langsung sifatnya kekeluargaan antara Pembina dengan yang dibina
2. Pembinaan yang bersifat persuasif yaitu berusaha mengubah tingkah laku melalui keteladanan.
3. Pembinaan berencana, terus menerus, dan sistematis. Pembinaan keperibadian yang meliputi kesadaran beragama, berbangsa dan bernegara, intelektual, kecerdasan, kesadaran hukum, keterampilan, mental spiritual.

Pembinaan narapidana baik dengan sistem pemasyarakatan maupun dengan pola pembinaan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana, diharapkan dapat berjalan sesuai

dengan aturan yang ada. Meskipun pada kenyataan terjadi banyak kelebihan kapasitas (*over capacity*) baik di dalam Lapas maupun di dalam Rutan serta jumlah petugas yang terlampau sedikit dibandingkan dengan jumlah narapidana yang semakin hari semakin bertambah, sehingga dapat menghambat pelaksanaan pembinaan narapidana. Hal tersebut tidak lantas dijadikan sebagai alasan, namun menjadi semangat bagi petugas pembinaan narapidana untuk melaksanakan kewajibannya yaitu membina narapidana dan memberikan bekal kehidupan yang lebih baik untuk kehidupan narapidana setelah menjalani masa pidananya.

5. Metode Pembinaan

Dalam upaya mencapai tujuan pembinaan, maka pembinaan dilaksanakan berdasarkan beberapa metode yang diatur berdasarkan pada Bab VI Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia yaitu mengenai metode pembinaan sebagai berikut:

1. Pemahaman tugas-tugas yang diemban

Untuk menentukan metode pelaksanaan pembinaan, maka Kalapas, Karutan/Kacabrutan dan Kabispa serta seluruh petugas harus terlebih dahulu mengenal apa yang menjadi tugas pokok mereka.

Dibawah ini di uraikan serangkaian faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menyusun program pembinaan dengan memperhatikan semua aspek sebagai berikut:

- a. Tujuan kegiatan
- b. Target kegiatan
- c. Pelaksanaan kegiatan (petugas)
- d. Peserta kegiatan (warga binaan masyarakat)
- e. Jenis kegiatan
- f. Sarana dan biaya
- g. Jangka waktu dan skedul kegiatan
- h. Monitoring dan Evaluasi

2. Faktor-faktor yang menyangkut warga binaan masyarakat yang perlu dipahami meliputi:

- a. Jenis perkara.
- b. Jenis pidana.
- c. Lamanya masa pidana.
- d. Jenis kelamin.
- e. Usia.
- f. Agama.
- g. Suku bangsa.
- h. Kondisi fisik dan psikologis
- i. Residivis atau bukan
- j. Latar belakang pribadi
 - Pendidikan
 - Status keluarga
 - Tingkat social
 - Status sosial
- k. Bakat-bakat dan hobby

Dengan memahami faktor-faktor ini, maka para petugas paling tidak akan dapat menerapkan metode pendekatan yang terbaik dalam melaksanakan pembinaan, termasuk meminimalisir faktor-faktor penghambat sehingga dengan potensi yang terbatas dapatlah dicapai hasil yang seoptimal mungkin.

3. Metode pembinaan/bimbingan meliputi:

- a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang sifatnya kekeluargaan antara Pembina dengan yang dibina (warga binaan Pemasyarakatan).
- b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha mengubah tingkah lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil di antara sesama mereka sehingga menggugah hatinya untuk melakukan hal-hal yang terpuji, menempatkan warga binaan pemasyarakatan sebagai manusia yang memiliki potensi dan memiliki harga diri dengan hak-hak kewajibannya yang sama dengan manusia lainnya.
- c. Pembinaan berencana, terus menerus dan sistematis.
- d. Pemeliharaan dan peningkatan langkah-langkah keamanan yang disesuaikan dengan tingkat keadaan yang dihadapi.
- e. Pendekatan individual dan kelompok.
- f. Dalam rangka menumbuhkan rasa kesungguhan, keikhlasan dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan, ketaatan, dan keteladanan di dalam pengabdianya terhadap negara, hukum, dan masyarakat, para petugas dalam jajaran pemasyarakatan perlu memiliki kode perilaku dan dirumuskan dalam bentuk ETOS KERJA yang isinya:

1. KAMI PETUGAS PEMASYARAKATAN ADALAH ABDI HUKUM,
PEMBINA NARAPIDANA DAN PENGAYOM MASYARAKAT.

2. KAMI PETUGAS PEMASYARAKATAN WAJB BERSIKAP BIJAKSANA DAN BERTINDAK ADIL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS .
3. KAMI PETUGAS PEMASYARAKATAN BERTEKAD MENJADI SURI TELADAN DALAM MEWUJUDKAN TUJUAN SISTEM PEMASYARAKATAN YANG BERDASARKAN PANCASILA.

Disadari bahwa dengan keterbatasan dana dan kemampuan untuk memberi tunjangan bagi petugas-petugas pemasyarakatan, maka imbalan yang diperolehnya belumlah seimbang dibandingkan dengan tenaga yang disumbangkan untuk bekerja siang malam tanpa lelah. Oleh karena itu, siapapun patut bangga melihat petugas pemasyarakatan yang bekerja dengan tulus ikhlas demi pengabdian terhadap negara dan bangsa. Dan hanya mereka yang mempunyai jiwa terpanggil untuk tugas-tugas pemasyarakatan, yang dapat menjadi petugas pemasyarakatan yang baik.

Pemerintah senantiasa memperhatikan keadaan ini dan kini sedang memperjuangkan perbaikan nasib para petugas tersebut. Namun sebagai pengabdian yang senantiasa mengutamakan kepentingan umum dan kepentingan kemanusiaan dan bekerja keras membina sesamanya keturunan Adam, seyogyanya sekurang-kurangnya yang masih dirasakan itu tidak akan menggoyahkan tekad para petugas pemasyarakatan untuk mengabdikan terus memenuhi tugas demi kejayaan bangsa dan negara. Dan untuk mempertahankan citra yang ideal yang dimiliki para petugas pemasyarakatan, maka pendekatan petugas pemasyarakatan dengan

narapidana/tahanan adalah bagaikan seorang dokter dengan pasiennya, seorang guru dengan muridnya dan orang tua dengan anaknya.

D. Sistem Pemasyarakatan

Pemasyarakatan pertama kali disampaikan oleh **Sahardjo**, di dalam pidato penerimaan gelar *doctor honoris causa* beliau dalam ilmu hukum dari Universitas Indonesia pada tanggal 5 Juli 1963, yakni di dalam pidato mana beliau antara lain telah mengemukakan rumusan tentang tujuan dari pidana penjara, yakni disamping menimbulkan rasa derita dari terpidana karena hilangnya kemerdekaan bergerak, membimbing terpidana agar bertaubat, mendidik ia menjadi seorang anggota masyarakat sosial Indonesia yang berguna.²⁴ **Sahardjo** memandang bahwa hukum sebagai pengayoman. Sehingga dari pandangan tersebut telah memberikan pemahaman baru bahwa tujuan dari pidana penjara ialah pemasyarakatan.

Konsep pemasyarakatan tersebut kemudian disempurnakan oleh Keputusan Konfrensi Dinas Para Pimpinan Kependidikan pada tanggal 27 April 1964 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pidana penjara di Indonesia dilakukan dengan sistem pemasyarakatan, suatu pernyataan disamping sebagai arah tujuan, pidana penjara dapat juga menjadi cara untuk membimbing dan membina.²⁵

²⁴ P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. *Op.cit.* hal. 165-166

²⁵ Dwidja Priyatno. *Op.cit.*, hal.97

Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem Pemasyarakatan di Indonesia saat ini mengacu kepada Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Penjelasan Umum Undang Undang Pemasyarakatan yang merupakan dasar yuridis filosofi tentang pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia dinyatakan bahwa:

1. Bagi negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran-pemikiran baru mengenai fungsi pemidanaan yang tidak lagi sekadar penjaraan tetapi juga merupakan suatu usaha rehabilitasi dan reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan telah melahirkan suatu sistem pembinaan yang sejak lebih dari tiga puluh tahun yang dikenal dan dinamakan sistem pemasyarakatan.
2. Walaupun telah diadakan berbagai perbaikan mengenai tatanan (stelsel) pemidanaan seperti pranata pidana bersyarat (Pasal 14a KUHP), pelepasan bersyarat (Pasal 15 KUHP), dan pranata khusus penentuan serta penghukuman terhadap anak (Pasal 45, 46, dan 47 KUHP), namun pada dasarnya sifat pemidanaan masih bertolak dari asas dan sistem pemenjaraan. Sistem pemenjaraan sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan, sehingga institusi yang dipergunakan sebagai tempat pembinaan adalah rumah penjara bagi narapidana dan Rumah Pendidikan Negara bagi anak yang bersalah.
3. Sistem pemenjaraan yang sangat menekankan pada unsur balas dendam dan penjaraan yang disertai dengan lembaga "Rumah

Penjara” secara berangsur-angsur dipandang sebagai suatu sistem dan sarana yang tidak sejalan dengan konsep rehabilitasi dan reintegrasi sosial, agar narapidana menyadari kesalahannya, tidak lagi berkendak untuk melakukan tindak pidana dan kembali menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi diri, keluarga dan lingkungannya.

Di dalam sistem pemasyarakatan terdapat beberapa istilah yang dimuat dalam Pasal 1 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu:

1. Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan, dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.
2. Sistem pemasyarakatan adalah suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara Pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
3. Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.
4. Balai Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut BAPAS adalah pranata untuk melaksanakan bimbingan Klien Pemasyarakatan.
5. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
6. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
7. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
8. Anak Didik Pemasyarakatan adalah:

- a. Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan Putusan Pengadilan menjalani pidana di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - b. Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun;
 - c. Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
9. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan BAPAS.

Sistem pemasyarakatan yang diharapkan dapat membina narapidana selama menjalani masa pidananya, dapat menjadi lebih baik sehingga nantinya dapat kembali diterima di lingkungan masyarakat. Berdasarkan hal tersebut maka dalam Pasal 3 UU No.12/1995 dinyatakan bahwa “fungsi sistem pemasyarakatan menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor K.P.10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965 tentang “Pemasyarakatan Sebagai Proses di Indonesia” maka metode yang digunakan dalam proses pemasyarakatan ini meliputi 4 (empat) tahap sebagai berikut:

- a. Tahap Orientasi/Pengenalan

Setiap narapidana yang masuk di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Cipinang dilakukan penelitian untuk segala hal ikhwal perihwal dirinya, termasuk sebab-sebab ia melakukan kejahatan, dimana ia tinggal,

bagaimana keadaan ekonominya, latar belakang pendidikan dan sebagainya.

b. Tahap Asmilasi dalam Arti Sempit

Jika pembinaan dari narapidana dan antara hubungannya dengan masyarakat telah berjalan kurang dari 1/3 dari masa pidana sebenarnya menurut Dewan Pembinaan Pemasyarakatan telah dicapai cukup kemajuan dalam proses antara lain: bahwa narapidana telah cukup menunjukkan perbaikan-perbaikan dalam tingkah laku, kecakapan dan lain-lain. Maka tempat atau wadah utama dari proses pembinaanya ialah gedung Lembaga Pemasyarakatan terbuka dengan maksud memberikan kebebasan bergerak lebih banyak lagi atau para narapidana yang sudah pada tahap ini dapat dipindahkan dari Lembaga Pemasyarakatan terbuka.

Pada tahap ini program keamanannya adalah medium. Di tempat baru ini narapidana diberi tanggung jawab terhadap masyarakat. Bersamaan dengan ini pula dipupuk harga diri, tatakrama, sehingga dalam masyarakat luas timbul kepercayaannya dan berubah sikapnya terhadap narapidana. Kontak dengan unsur-unsur masyarakat frekuensinya lebih diperbanyak lagi misalnya kerja bakti dengan masyarakat luas. Pada saat ini dilakukan kegiatan bersama-sama dengan unsur masyarakat. Masa tahanan yang harus dijalani pada tahap ini adalah sampai berkisar $\frac{1}{2}$ dari masa pidana yang sebenarnya.

c. Tahap Asimilasi dalam Arti Luas

Jika narapidana sudah menjalani kurang dari $\frac{1}{2}$ masa pidana yang sebenarnya menurut Dewan Pembina Pemasyarakatan dinyatakan proses pembinaannya telah mencapai kemajuan yang lebih baik, maka mengenai diri narapidana maupun unsur-unsur masyarakat, maka wadah proses pembinaan diperluas ialah dimulai dengan usaha asimilasi para narapidana dengan penghidupan masyarakat luar yaitu seperti kegiatan mengikutsertakan pada sekolah umum, bekerja pada badan swasta atau instansi lainnya, cuti pulang beribadah dan berolah raga dengan masyarakat dan kegiatan-kegiatan lainnya. Pada saat berlangsungnya kegiatan segala sesuatu masih dalam pengawasan dan bimbingan petugas Lembaga Pemasyarakatan. Pada tingkat asimilasi ini tingkat keamanannya sudah minimum sedangkan masa tahanan yang dijalani adalah $\frac{2}{3}$ -nya.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan dilakukan berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan berdasarkan Pasal 2 UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa “ sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Sistem pemasyarakatan yang berlaku dan diterapkan saat ini dalam pelaksanaan hukuman terhadap narapidana antara lain:

- a. Orang tidak mengenal perbedaan agama dan suku bangsa
- b. Orang hanya mengenal perbedaan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan lamanya pidana
- c. Kualifikasi berdasarkan perbedaan usia, hanya mengenal atau mengakui perbedaan antara narapidana dewasa dan anak-anak
- d. Kualifikasi berdasarkan perbedaan kelamin, hanya mengenal perbedaan antara narapidana pria dan wanita
- e. Kualifikasi berdasarkan lamanya pidana, dibuat perbedaan antara:
 1. Narapidana dewasa dan anak-anak yang dijatuhi pidana lebih dari lima tahun.
 2. Narapidana dewasa dan anak-anak yang dijatuhi pidana antara satu sampai dengan lima tahun.
 3. Narapidana dewasa dan anak-anak yang dijatuhi pidana kurang dari satu tahun.

Melihat apa yang terjadi saat ini, bahwa masih banyak pandangan yang keliru tentang pemahaman keberadaan Lembaga Pemasyarakatan sebagai sistem pemasyarakatan. Sebagian besar masyarakat dari berbagai golongan menganggap bahwa sistem pemasyarakatan itu merupakan sistem pembalasan dendam kepada narapidana atas perbuatannya. Menurut **P.A.F. Lamintang**, bahwa tujuan pemidanaan atau tujuan dari penempatan orang didalam Lembaga Pemasyarakatan

berupa pemasyarakatan tidak akan pernah dicapai dengan efektif dan efisien, selama masih terdapat perbedaan pandangan diantara para penyidik, para jaksa, para hakim dan para pelaksana pemasyarakatan tentang hakikat pembedaan, khususnya tentang hakikat penempatan orang di dalam Lembaga Pemasyarakatan.²⁶

Berdasarkan pada hal tersebut, perbedaan pandangan ini akan menyebabkan terjadinya disfungsi dari Lembaga Pemasyarakatan tentang pembinaan narapidana. Pada dasarnya tujuan pemasyarakatan ialah dapat mengembalikan narapidana kedalam lingkungan masyarakat. Sehingga penyidikan, penuntutan oleh Penuntut Umum, dan penjatuhan sanksi pidana bagi terdakwa oleh Majelis Hakim harus didasarkan pada “Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Bukan atas dasar balas dendam. Karena pada prinsipnya meskipun narapidana dalam menjalani masa pidana kehilangan kemerdekaannya, namun setelah menjalani masa pidananya dan kembali ke lingkungan masyarakat narapidana tersebut dapat memperoleh kembali hak-haknya sebagai warga negara.

Mengingat kenyataan bahwa sejumlah narapidana yang ditempatkan terlalu lama di dalam Lembaga Pemasyarakatan menjadi lebih rusak perilaku mereka dibandingkan dengan keadaan mereka yang saat mereka dimasukkan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan, kiranya cukup bijaksana jika orang berkenaan mendengar nasehat mantan Menteri

²⁶ P.A.F. Lamintanf, Theo Lamintang. *Op.cit.*, hal.177

Kehakiman Belanda yang mengatakan bahwa hendaknya pidana itu merupakan suatu *ultimum remedium*, yang apabila ia dipandang sebagai obat, pemberiannya jangan sampai membuat penyakitnya sendiri lebih parah.²⁷

E. Rumah Tahanan Negara

Rumah Tahanan Negara atau biasa disebut Rutan merupakan salah satu Unit Pelaksanaan Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam hal pembinaan tahanan dan narapidana.

Dalam UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP disebutkan bahwa:

“Rutan merupakan institusi yang melaksanakan penahanan para tersangka atau terdakwa tindak pidana secara fisik dan secara yuridis tetap berada pada instansi yang menahannya, lebih lanjut dijelaskan bahwa Rutan merupakan tempat pelaksanaan tetap berlandaskan pada asas praduga tak bersalah, Rutan merupakan rangkaian proses pemidanaan yang diawali dengan proses penyidikan, penuntutan, serta pemeriksaan di pengadilan”.

Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Menteri Kehakiman Republik Indonesia dijelaskan bahwa Rutan diklasifikasikan ke dalam (3) tiga kelas yaitu Rutan Klas I, Rutan Klas IIA, dan Rutan Klas IIB. Klasifikasi tersebut berdasarkan atas kapasitas dan lokasi.

²⁷ *Ibid.*

Pada awalnya Rutan ialah tempat bagi tahanan yang statusnya belum mendapatkan vonis dari pengadilan. Tetapi seiring berjalannya waktu melihat keadaan Lapas yang kelebihan kapasitas mengakibatkan Rutan dialihfungsikan menjadi tempat bagi tahanan dan narapidana. Selain itu, di beberapa Kabupaten/Kota tidak memiliki Lembaga Pemasyarakatan, sehingga sebagian besar narapidananya di tempatkan dan di bina di Rutan.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan ditentukan bahwa:

“Rutan melakukan perawatan dan pelayanan tahanan mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai pada pemeriksaan di sidang pengadilan, serta pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran tahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Rutan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya ialah melakukan perawatan dan pelayanan terhadap tahanan. Hal ini merupakan penjabaran dari Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1985 tentang Fungsi Fungsi Rutan sebagai berikut:

1. Melakukan administrasi, membuat statistik dan dokumentasi tahanan serta memberikan perawatan dan pemeliharaan kesehatan tahanan.
2. Mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan.
3. Memberikan bimbingan bagi tahanan.

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Pasal 3 disebutkan bahwa Fungsi Rutan yaitu:

- a. melakukan pelayanan tahanan;
- b. melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib RUTAN;
- c. melakukan pengelolaan RUTAN;
- d. melakukan urusan tata usaha.

Namun melihat kenyataan, bahwa Rutan tidak hanya sekadar tempat bagi tahanan tetapi juga telah memiliki fungsi lain yaitu sebagai tempat bagi narapidana karena alasan kelebihan kapasitas pada Lembaga Pemasyarakatan. Hal tersebut sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman No. M.04.UM..01.06 Tahun 1983 tentang Penetapan Lembaga Pemasyarakatan Tertentu sebagai Rumah Tahanan Negara. Yang berarti bahwa Lapas dapat beralih fungsi menjadi Rutan.

Pada dasarnya, Rutan dan Lapas merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Penempatan penghuni Rutan maupun Lapas didasarkan pada pasal 12 UU No. 12 Tahun 1995 dan pasal 7 PP No. 58 tahun 1999 yakni berdasarkan penggolongan umur, jenis kelamin, dan jenis tindak pidana/kejahatan. Selain itu Rutan dan Lapas memiliki fungsi yang berbeda yaitu:

1. Rutan merupakan tempat bagi terdakwa ditahan sementara sebelum keluarnya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap guna menghindari tersangka/terdakwa tersebut melarikan diri atau mengulangi perbuatannya. Sedangkan, Lapas merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.
2. Rutan di tempati oleh tersangka atau terdakwa. Sedangkan Lapas di tempati oleh narapidana/tepidana.
3. Dalam Rutan waktu/masa hukuman yaitu selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Sedangkan dalam Lapas waktu/ masa hukuman yaitu selama proses hukuman/ menjalani sanksi pidana.
4. Penempatan di dalam Rutan ialah Selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Sedangkan, penempatan di dalam Lapas ialah Setelah dijatuhi putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap.

Rutan di bentuk di tiap Kabupaten/Kota hal tersebut berdasarkan pada Pasal 18 ayat (1) PP No. 27 tahun 1983. Namun pada kenyataannya, di Indonesia saat ini tidak semua Kabupaten/kota mempunyai Rutan ataupun Lapas. Sehingga terjadi pengalihan fungsi dari Rutan menjadi Lapas, begitupun sebaliknya Lapas yang juga berfungsi sebagai Rutan. Hal tersebut karena terjadinya kelebihan kapasitas penghuni baik di Rutan maupun di Lapas, mengingat tingkat kejahatan di Indonesia dari tahun ke

tahun semakin meningkat dalam berbagai bidang seperti tindak pidana narkoba, tindak pidana korupsi, tindak pidana pelecehan seksual, dan tindak pidana baik yang dalam kodifikasi maupun di luar kodifikasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Dalam proses penyusunan skripsi, salah satu tahapan yang harus dilalui adalah dengan melakukan penelitian. Penelitian dilakukan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidrap, yang bertempat di Jl. Pengayoman Galung Aserae, Pangkajene Kabupaten Sidenreng Rappang.

Penulis memilih lokasi tersebut karena tempat tersebut merupakan satu-satunya tempat pembinaan narapidana yang ada di Kabupaten Sidrap. Selain itu, tempat tersebut berhubungan langsung dengan obyek penelitian sehingga penulis dapat memperoleh sumber data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan skripsi.

B. Populasi dan Sampel

Populasi penelitian Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidrap ialah Pejabat, Pegawai dan Narapidana Rutan Klas IIB Sidrap. Sedangkan sampel penelitian yaitu 3 Pejabat Rutan, 1 Pegawai bidang Pembinaan narapidana, dan 20 narapidana.

C. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini terdiri atas 2 (dua) macam yaitu:

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil observasi secara langsung terkait peristiwa, aktivitas, dan fakta tentang pembinaan narapidana di Rutan Klas IIB Sidrap. Selain itu data juga

diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak *informan* seperti Kepala Rutan, Petugas Rutan, Narapidana.

2. Data skunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur yang berhubungan dengan masalah. Data yang berupa artikel tentang Rutan Sidrap yang dimuat di media cetak ataupun media elektronik, laporan-laporan dan dokumen-dokumen tentang kegiatan pembinaan narapidana di Rutan Sidrap.

D. Teknik Pengumpulan Data

Dalam usaha menyaring data sebagai bahan pengkajian dan analisis dalam penyusunan dan penulisan skripsi, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data berikut:

1. Studi lapangan

Kegiatan ini dilakukan di lokasi penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik sebagai berikut:

- a. Observasi atau pengamatan langsung terhadap objek kajian penelitian. Penelitian ini ditujukan kepada pelaksanaan pembinaan Warga binaan, para Pembina/staf dalam melaksanakan kegiatan pembinaan.
- b. *Interview* (Wawancara) yaitu pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk Tanya jawab kepada responden (Kepala Rutan, Petugas Rutan, Narapidana) yang mengerti tentang objek penelitian penulis dan dapat memberikan informasi yang penulis butuhkan. Dalam melaksanakan teknik interview (wawancara), maka akan

dibuat daftar pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan penelitian ini sebagai pedoman dalam wawancara, sehingga pertanyaan yang diajukan tidak menyimpang dari tujuan penelitian ini.

- c. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan dalam bentuk dokumentasi atau pengambilan gambar mengenai kegiatan-kegiatan pembinaan yang dilaksanakan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidrap.

E. Analisis Data

Data yang diperoleh, baik data primer maupun data skunder agar dapat menjadi sebuah karya ilmiah/ skripsi yang terpadu dan sistematis, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidrap

1. Gambaran Umum Rutan Klas IIB Sidrap.

Pada mulanya Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidenreng Rappang beralamat di jalan Kartini, Kelurahan Rappang Kecamatan Panca Rijang yang dibangun sejak tahun 1935 dengan kapasitas 56 orang. Tetapi sejalan dengan kondisi bangunan yang sudah tua dan sempit serta melihat bentuk dan struktur bangunan yang sudah tidak memadai lagi untuk pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, maka Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang menyerahkan tanah seluas 20.000 m² (dua puluh meter persegi) dalam bentuk hibah untuk kepentingan pembangunan Rutan baru dan sejak tahun 2005 di bangunlah Rumah Tahanan Negara yang baru yang terletak di jalan Galung Aserae, Kelurahan Pitu Rijang Kecamatan Maritengngae yang diresmikan penggunaannya oleh Menteri Hukum dan HAM RI oleh **Patrisia Akbar** tanggal 21 Juni 2011 dan mulai difungsikan pada tanggal 27 Oktober 2011 dengan kapasitas 155 orang. Pada saat ini jumlah rata-rata penghuni Rutan adalah sekitar 300 orang dan sudah mengalami *over kapasitas*.²⁸

Rumah Tahanan Negara Sidenreng Rappang yang baru yang berlokasi di jalan Pengayoman Galung Aserae berdekatan dengan Kantor

²⁸ Profil Rumah Tahanan Klas IIB Sidrap

Bupati dan Kantor SKPD lainnya, Kodim, Polsek Maritengngae berjarak kurang lebih 1 km, dan Kantor Kejaksaan Negeri Sidenreng Rappang, Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta Polres Sidenreng Rappang berjarak kurang lebih 3 km.²⁹

Rutan Klas IIB Sidenreng Rappang dengan luas bangunan berukuran 6.083 m² terdiri dari Gedung kantor Utama, Ruang Kunjungan, Keamanan dan Konsultasi, Ruang Pendidikan, Mushallah, Dapur Umum, Blok Hunian, Sel Straf, Blok Hunian Khusus Wanita, Rumah Dinas Tipe C, Rumah Dinas Tipe E, Pos Jaga Atas, Aula Poliklinik, Bengkel Kerja, Pos Blok yang semuanya dalam kondisi baik dan layak pakai.³⁰

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Tahanan Negara dan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Menteri Kehakiman Republik Indonesia Pasal 20 bahwa Susunan Organisasi RUTAN Kelas II (dua) B terdiri dari :

- a. Sub Seksi Pelayanan Tahanan;
- b. Sub Seksi Pengelolaan Rutan;
- c. Kesatuan Pengamanan Rutan;
- d. Petugas Tata Usaha.

Selanjutnya dalam Pasal 21 dijelaskan tugas masing-masing sub sebagai berikut:

²⁹ ibid

³⁰ Ibid.

- (1) Sub seksi Pelayanan Tahanan mempunyai tugas melakukan pengadministrasian dan perawatan, mempersiapkan pemberian bantuan hukum dan penyuluhan bagi tahanan.
- (2) Sub Seksi Pengelolaan Rutan mempunyai tugas melakukan pengurusan keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan kepegawaian di lingkungan Rutan.
- (3) Kesatuan Pengamanan Rutan mempunyai tugas memelihara keamanan dan ketertiban Rutan.
- (4) Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan surat menyurat dan kearsipan.

Berdasarkan pernyataan dari bapak **Syamsul Bahri** selaku Kepala

Subsi Pengelolaan bahwa:

“Rutan Klas IIB Sidrap memiliki 4 (empat) Pejabat Struktural dan yang lainnya merupakan pegawai yang semuanya berstatus PNS. Penerimaan pegawai Rutan dilaksanakan berdasarkan sistem online dan diseleksi secara langsung oleh pihak Kementerian Hukum dan HAM RI.”

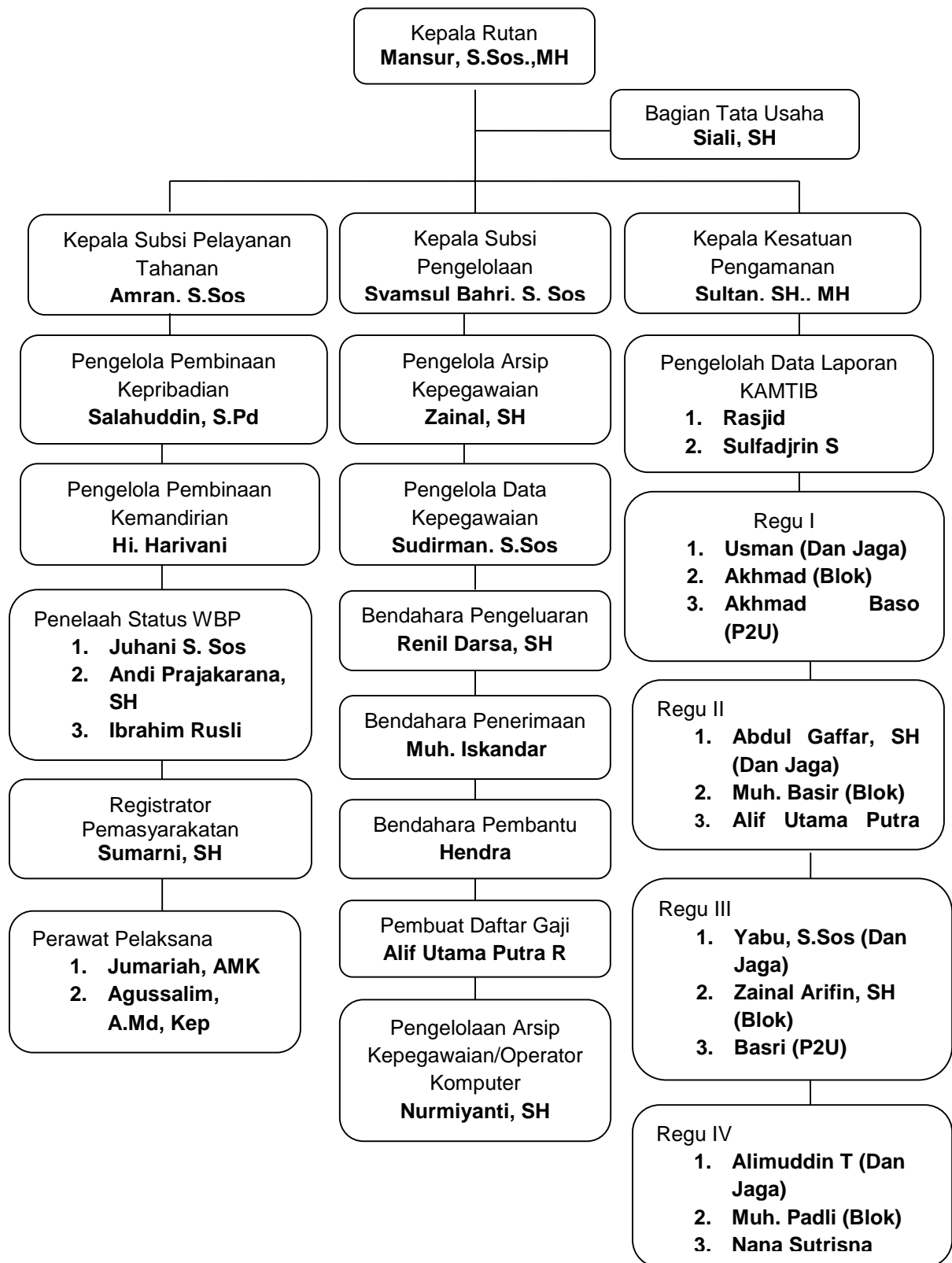
Berdasarkan hal tersebut, berikut akan diuraikan pejabat struktural dan pegawai Rutan Klas IIB Sidrap berdasarkan Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidrap sebagai berikut.

Tabel 4.1
Data Pegawai Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidrap

No	Uraian Tugas	Status	Jumlah
1	Pejabat Struktural	PNS	4 Orang
2	Petugas Pengamanan	PNS	12 orang
3	Staf Pelayanan tahanan	PNS	8 orang
4	Staf Pengelolaan	PNS	7 orang
5	Staf Pengamanan	PNS	2 orang
Jumlah			33 orang

(sumber: Profil Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidrap)

Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidenreng Rappang



Berdasarkan Struktur Organisasi Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidrap, Rutan Sidrap memiliki 33 (tiga puluh tiga) pegawai yang dipimpin oleh Kepala Rumah Tahanan Negara yaitu bapak **Mansyur** yang membawahi 3 Kasubsi antara lain :

1. KA Subsidi Pelayanan Tahanan

Adapun unit kerja Ka Subsidi Pelayanan Tahanan di bawah oleh bapak **Amran** antara lain:

a. Unit Pembinaan Kepribadian dan Kemandirian

Bertugas melakukan pembinaan bagi narapidana, baik pembinaan kepribadian maupun kemandirian. Memberikan bimbingan selama proses pembinaan, mengatur jadwal proses pelaksanaan pembinaan kepribadian maupun kemandirian serta mengawasi proses pembinaan yang dilaksanakan di Rutan Sidrap.

b. Unit Penelaah Status WBP

Bertugas mengelolah data tahanan/narapidana Rutan Sidrap, mengklasifikasikan narapidana yang berhak memperoleh Cuti Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Bebas Bersyarat berdasarkan laporan hasil pembinaan narapidana dan pengamatan mengenai perilaku narapidana selama berada di rutan.

c. Unit Registrasi

Bertugas melakukan pendaftaran, pengambilan sidik jari, pemberian nomor register bagi narapidana baru, mencatat dan menyimpan barang-barang milik narapidana/anak didik, mencatat pentahapan pelaksanaan

hukuman narapidana dan pengusulan pemberian pemotongan hukuman (remisi) serta melakukan proses administrasi pemindahan narapidana dan pemulangan narapidana yang bebas.

d. Unit Perawat Pelaksana

Bertugas melakukan pemeriksaan kesehatan bagi narapidana baru dan pelayanan kesehatan bagi narapidana; melakukan pemeriksaan badan, lingkungan, pengobatan secara berkala kepada narapidana; melakukan rujukan bagi narapidana yang sakit dan harus dirawat di Rumah sakit luar Rutan.

2. Ka Subsidi Pengelolaan

Adapun unit kerja Ka Subsidi Pengelolaan yang dibawahhi oleh bapak **Syamsul Bahri** antara lain:

a. Unit Kepegawaian

Unit kepegawaian yang terdiri dari Pengelolaan Arsip Kepegawaian, Pengelolaan Data Kepegawaian pada umumnya mengurus tentang administrasi kepegawaian Rutan Sidrap. Secara terperinci tugas unit kepegawaian ialah melaksanakan pengajuan usulan formasi pegawai, KARPEG, KARIS, KARSU, ASKES, TASPEN, menyiapkan Daftar urut kepangkatan, bezzeting, bahan pengajuan usulan mutasi, promosi jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, usulan penghargaan, hukuman disiplin, pensiun dan pelantikan/pengambilan sumpah pegawai/pejabat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tercapai tertib Administrasi Kepegawaian.

b. Unit Keuangan

Unit Keuangan yang terbagi atas bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pembantu, dan Pembuat Daftar Gaji pada umumnya mengelolah keuangan Rutan Sidrap baik dalam bentuk penerimaan maupun pengeluaran. Lebih khususnya unit keuangan bertugas melaksanakan administrasi pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, pembayaran gaji pegawai, penatausahaan keuangan dan laporan keuangan dalam rangka pelayanan administratif dan fasilitatif Rumah Tahanan Negara Sidrap

Namun dalam hal pelaksanaan tanggung jawab, karena keterbatasan pegawai akhirnya banyak pegawai yang merangkap dalam bidang lainnya. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala Subsidi Pengamanan bapak **Syamsul Bahri** bahwa:

“Kondisi pegawai yang kurang, mengakibatkan beberapa pegawai merangkap di bidang yang lain seperti Salahuddin yang sebelumnya hanya bertanggung jawab dalam pembinaan kepribadian, saat ini bertanggung jawab pula dalam pembinaan kemandirian. Sedangkan Hariyani yang sebelumnya bertanggung jawab di bidang Pembinaan Kemandirian beralih ke Bagian Tata Usaha. Selain itu ada Nurmiyanti yang sebelumnya bertanggung jawab dalam Pengelolaan Arsip Kepegawaian/Operator Komputer di bagian Subsidi Pengelolaan kini merangkap pula di bagian Tata Usaha.”

3. Kepala Kesatuan Pengamanan

Adapun unit kerja Kepala Kesatuan Pengamanan yang dibawah oleh bapak **Sultan** ialah unit pengelolaan data laporan yang bertugas menyusun konsep jadwal tugas pengamanan bagi narapidana/tahanan. Membuat database tahanan/narapidana dan memperbaruinya setiap

ada penambahan ataupun pengurangan jumlah tahanan/narapidana. Membuat jadwal regu jaga untuk pengamanan Rutan Sidrap dan manajemen kunjungan bagi tahanan/narapidana. Melakukan pemeriksaan terhadap pengunjung dan barang bawaan yang hendak diberikan kepada tahanan/narapidana. Mengatur jam besuk bagi tahanan/narapidana. Mencatat administrasi pelaksanaan pengawalan bagi narapidana yang keluar Rutan dengan alasan tertentu.

Berdasarkan keterangan dari bapak **Sultan** Kepala Kesatuan Pengamanan Bahwa:

Rutan Sidrap hanya memiliki 12 (dua belas) petugas jaga yang terdiri dari 4 (empat) Regu. Setiap Regu terdiri dari 3 (tiga) Petugas. Jika dirata-ratakan, maka setiap pegawai jaga dalam 1 satu regu kerja jika dirata-ratakan dengan jumlah tahanan/narapidana mengawasi sekitar seratusan tahanan/narapidana. Hal tersebut dikarenakan jumlah penghuni Rutan yaitu sebanyak 301 tercatat 4 januari 2017 berdasarkan Data Penghuni Rutan Klas IIB Sidrap.

Tabel 4.2
Data Penghuni dan Kapasitas Hunian Periode 2012-2016 Rutan Klas IIB Sidrap.

Uraian	Tahun				
	2012	2013	2014	2015	2016
Tahanan Dewasa	172	175	198	245	286
Tahanan Anak	6	3	4	3	17
Jumlah	178	178	202	248	302
Selisih Penambahan Penghuni	-	-	-	-	-
Kapasitas	153	153	153	153	153
Selisih Penambahan kapasitas	-	-	-	-	-
Over Crowded	25	25	49	95	149

(sumber: Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah [LAKIP] Rutan Sidrap)

Berdasarkan pada tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa setiap tahunnya terjadi peningkatan jumlah penghuni tahanan dewasa Rutan Klas IIB Sidrap mulai tahun 2012 hingga tahun 2016. Jumlah tahanan Rutan Klas IIB Sidrap hingga tahun 2016 ialah 286 jiwa. Sedangkan tahanan anak mengalami penurunan dari tahun 2012 hingga 2016. Jumlah penghuni Rutan Sidrap hingga tahun 2016 ialah sebanyak 302 jiwa berdasarkan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Rutan Klas IIB Sidrap Semester II.

Namun jika dilihat dari kapasitas Rutan Klas IIB Sidrap dari tahun 2012 hingga tahun 2016, Rutan hanya mampu menampung tahanan/narapidana sebanyak 153 jiwa. Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa Rutan Sidrap selalu mengalami kelebihan kapasitas (*over capacity*) dari tahun 2012 hingga tahun 2016. Pada tahun 2012 dan 2013, penghuni Rutan sebanyak 178 orang dengan kapasitas Rutan 153 orang sehingga Rutan Sidrap di tahun tersebut mengalami *over capacity* dengan persentase sekitar 85% atau sebanyak 25 orang. Di tahun 2014 jumlah penghuni Rutan mengalami peningkatan yaitu sebanyak 202 orang dengan kapasitas Rutan yang masih sama yaitu 153 hal tersebut menunjukkan bahwa di tahun 2014 Rutan Sidrap mengalami *over capacity* sekitar 75% atau sebanyak 49 orang. Di tahun 2015 jumlah penghuni Rutan kembali mengalami peningkatan yaitu sebanyak 248 orang dengan kapasitas Rutan 153 orang, dengan persentase *over capacity* sekitar 61% atau sebanyak 95 orang. Terakhir pada tahun 2016

jumlah penghuni Rutan mengalami peningkatan hampir dua kali lipat dari kapasitas Rutan yaitu sebanyak 301 orang dengan persentase *over capacity* sekitar 50% atau sebanyak 149.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Rutan Klas IIB Sidrap bahwa jumlah Penghuni Sidrap 4 Januari 2017 yaitu 301 orang yang terdiri dari narapidana dan tahanan titipan Kejaksaan. Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Subsidi Pengelolaan bapak **Syamsul Bahri** bahwa:

“Kenyataannya bahwa Rutan Sidrap telah mengalami *over capacity* atau kelebihan kapasitas, karena daya tampung hanya untuk 153 orang namun penghuni rutan kini hampir dua kali lipat dari jumlah kapasitas Rutan berdasarkan data penghuni Rutan per 4 Januari 2017 sebanyak 301 orang.”

Berikut merupakan data isi Rutan Klas IIB Sidrap secara umum dan data Penghuni Rutan berdasarkan tindak pidana yang dilakukan:

Tabel 4.3
Daftar Isi RUTAN Menurut Status dan Sex

Status Golongan	P	W	Jumlah
A. Tahanan			
A I	22	-	22
A II	1	-	1
A III	34	3	37
A IV	5	1	6
A V	2	1	3
Jumlah	64	5	69
B. Narapidana			
B I	203	6	209
B IIa	19	3	22
B IIb	-	-	-
B III	1	-	1
Lain-lain	-	-	-
Jumlah	223	9	232
Total	287	14	301

(sumber: data Rutan Klas IIB Sidrap 4 Januari 2017)

Berdasarkan tabel diatas, bahwa jumlah penghuni Rutan Sidrap per 4 Januari 2017 yaitu sebanyak 301 orang yang terdiri dari tahanan dan narapidana. Dari data tersebut dijelaskan bahwa jumlah tahanan yaitu 69 orang yang terdiri dari tahanan titipan penyidik (I) sebanyak 22 orang, tahanan titipan Kejaksaan (II) sebanyak 1 orang, tahanan titipan Pengadilan (III) sebanyak 37 orang, tahanan tingkat banding (IV) sebanyak 6 orang, dan tahanan tingkat kasasi (V) sebanyak 3 orang. Sedangkan jumlah narapidana sebanyak 232 orang yang terdiri dari narapidana Klas I sebanyak 209 orang, narapidana Klas IIA sebanyak 22 orang dan narapidana Klas III sebanyak 1 orang.

Tabel 4.4
Daftar Isi RUTAN Menurut Status & Jenis Kejahatan

Jenis Kejahatan Pasal (KUHP)	Status			
	Tahanan		Narapidana	
	P	W	P	W
UU NO. 23/2002	2		6	-
281-287	-	5	1	
303	6	-	-	-
324-336	5	-	4	-
338-350	-	-	18	-
351-356	1	-	5	-
362-365	11	-	11	-
372-395	-	2	3	-
Lain-lain	-	-	4	-
Jumlah	25	7	52	-

(sumber: data Rutan Klas IIB Sidrap 4 Januari 2017)

Berdasarkan pada tabel diatas bahwa dalam Rutan Sidrap, terdapat beberapa kasus tindak pidana umum antara lain pelanggaran atas Pasal

281 - Pasal 287 yang merupakan Kejahatan terhadap kesusilaan berjumlah 6 orang masing-masing merupakan 5 orang yang berstatus tahanan dan 1 orang yang berstatus narapidana. Selanjutnya pelanggaran atas Pasal 303 tentang kasus Perjudian berjumlah 6 orang yang masih berstatus tahanan. Pelanggaran atas Pasal 324 - Pasal 336 yaitu Kejahatan Terhadap Kemerdekaan berjumlah 9 orang, 5 diantaranya masih berstatus tersangka dan 4 lainnya merupakan narapidana. Selanjutnya pelanggaran atas Pasal 338 - Pasal 350 tentang Kejahatan Terhadap Nyawa berjumlah 14 orang yang berstatus narapidana. Pelanggaran atas Pasal 351 - Pasal 356 tentang Penganiyaan berjumlah 6 orang, 1 tahanan dan 5 narapidana.

Dalam kasus pelanggaran atas Pasal 362 – Pasal 365 tentang Pencurian berjumlah 22 orang yang terdiri dari 11 orang yang masih berstatus tahanan dan 11 lainnya merupakan narapidana. Selanjutnya pelanggaran atas Pasal 372 - Pasal 395 tentang Perbuatan Curang dengan jumlah 5 orang, 2 orang merupakan tahanan dan 3 orang berstatus narapidana. Selain itu berdasarkan pada tabel diatas terdapat 4 narapidana penghuni Rutan dengan keterangan kasus lain-lain.

Selain tindak pidana umum, adapula tindak pidana khusus yaitu pelanggaran terhadap UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dengan jumlah pelaku 8 orang, 2 orang berstatus tahanan dan enam lainnya merupakan narapidana. Jumlah penghuni data Rutan Klas IIB Sidrap berdasarkan Kejahatan terhadap Tindak Pidana Umum ditambah

tindak pidana khusus Perlindungan Anak sebanyak 85 orang yang terdiri dari tahanan dan narapidana Rutan Klas IIB Sidrap.

Tabel 4.5
Daftar Isi Penghuni Kasus Narkoba RUTAN Klas IIB Sidrap Januari 2017

Status	Pria	Wanita	Jumlah
Tahanan	37	2	39
Narapidana	152	5	157
Total	189	7	196

(sumber: data Rutan Klas IIB Sidrap 2 Januari 2017)

Berdasarkan tabel Daftar Penghuni Kasus Narkotika Rutan Sidrap Per 2 Januari Tahun 2017 bahwa Jumlah penghuni Rutan sidrap mayoritas merupakan kasus Tindak Pidana Narkotika dengan jumlah sebanyak 196 orang dari 301 penghuni rutan. Hal tersebut berarti bahwa 65% penghuni Rutan Sidrap atas kasus Tindak Pidana Narkotika. Berdasarkan hal tersebut sehingga Rutan Sidrap menurut bapak **Syamsul Bahri** bahwa:

“Rutan Sidrap kalau dilihat dari jumlah penghuninya yang mayoritas merupakan pelaku Tindak Pidana Narkotika, maka Rutan Sidrap ini layak nya khusus bagi Narapidana Narkotika sehingga Rutan dapat ditingkatkan stutusnya menjadi Lapas Narkotika apalagi mengingat Sidrap sebagai salah satu daerah rawan Narkoba di Sulawesi Selatan.”

Tabel 4.6
Daftar Penghuni Menurut Agama

No	Agama	Jumlah
1	Islam	271 orang
2	Kristen	1 orang
3	Hindu	29 orang

4	Budha	-
5	Katolik	-
Total		301 orang

(sumber: data Rutan Klas IIB Sidrap 4 Januari 2017)

Data penghuni Rutan berdasarkan agama dapat dilihat pada tabel diatas yang menunjukkan bahwa sebagian besar Penghuni Rutan merupakan umat Muslim yang berjumlah 271 orang, sedangkan yang non muslim terdiri dari Hindu sebanyak 29 orang dan Kristen 1 orang. Klasifikasi penghuni Rutan berdasarkan agamanya sangat penting terkhusus dalam hal pembinaan narapidana nantinya. Hal ini akan menjadi acuan dalam pemberian pembinaan kepada narapidana di bidang kepribadian khususnya keagamaan.

Tabel 4.7
Data Penghuni Rutan Klas IIB Sidrap Berdasarkan Pendidikan

Tingkat Pendidikan	P	W	Jumlah
BH	10	-	10
SD	74	5	79
SMP	121	3	124
SMA	55	5	60
SMK	14	-	14
Sarjana	13	1	14
Jumlah	287	14	301

(sumber: data Rutan Klas IIB Sidrap 4 Januari 2017)

Data penghuni Rutan berdasarkan pendidikannya meliputi, tahanan/narapidana yang Buta Huruf sebanyak 10 Orang. Selanjutnya narapidana /tahanan lulusan Sekolah dasar (SD) sebanyak 79 orang yang terdiri dari 74 laki-laki dan 5 Perempuan. Narapidana/tahanan lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 124 orang terdiri dari 121 laki-laki dan 3 perempuan. Narapidana/tahanan lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 60 orang terdiri dari 55 laki-laki dan 5 perempuan. Sedangkan narapidana/tahanan yang lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebanyak 14 orang laki-laki. Terakhir narapidana/tahanan dengan gelar Sarjana sebanyak 14 orang terdiri dari 13 laki-laki dan 1 perempuan.

2. Bentuk Bentuk Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rutan

Klas IIB Sidrap

Berdasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M. 02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Narapidana/Tahanan Menteri Kehakiman Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan bahwa ruang lingkup pembinaan dibagi ke dalam dua bidang yaitu Bidang Kepribadian dan Bidang Kemandirian.

Bidang Kepribadian meliputi Pembinaan Kesadaran Beragama, Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara, Pembinaan Kemampuan Intelektual (Kecerdasan), Pembinaan Kesadaran Hukum,

Pembinaan Mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Sedangkan Bidang Kemandirian meliputi Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri, Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil, keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing, dan keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian (perkebunan) dengan menggunakan teknologi madya atau teknologi tinggi.

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Rutan Sidrap dilaksanakan berdasarkan dengan ketentuan yang ada. Pembinaan narapidana yang dilaksanakan di Rutan Sidrap terdiri dari Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Pembinaan Kepribadian yang diterapkan terdiri dari Pembinaan Kesadaran Beragama berupa Pembinaan Kerohanian dan Sanggar Aksara Alqur'an , selanjutnya yaitu pembinaan Kemampuan Intelektual berupa Paket A serta pembinaan Kesehatan jasmani dan rohani yang meliputi kegiatan senam dan olahraga.

Pembinaan selanjutnya yaitu pembinaan kemandirian berupa keterampilan kerja dan pengembangan bakat yang dimiliki oleh narapidana. Pembinaan Kepribadian maupun Pembinaan Kemandirian dilaksanakan oleh bapak **Salahuddin** selaku Pengelola Pembinaan bidang Kepribadian dan Kemandirian. Berikut adalah Protap pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rutan Klas IIB Sidrap.

Tabel 4.8
Daftar Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Rutan Klas IIB Sidrap.

No.	Hari	Jenis Kegiatan	Waktu
1.	Senin	Paket A	09.00
		Sanggar Aksara Alqur'an Laki-laki	11.00
2.	Selasa	Senam	07.00
		Pembinaan Kerohanian	09.00
3.	Rabu	Paket A	08.00
		Sanggar Aksara Alqur'an Perempuan	10.00
4.	Kamis	Sanggar Aksara Alqur'an Laki-laki	08.00
5.	Jumat	Senam	07.00
		Sanggar Aksara Alqur'an Laki-laki	08.00

(sumber: Protap pembinaan Narapidana Rutan Sidrap)

Berdasarkan pada protap tersebut diatas, berikut akan penulis uraikan program pembinaan dan pelaksanaan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidrap yaitu:

a. Pembinaan Kepribadian

1. Pembinaan kerohanian

Pembinaan kerohanian merupakan salah satu bagian dari pembinaan Kepribadian bagi narapidana. Pembinaan kerohanian bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan narapidana terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui pembinaan kerohanian dengan penerapan nilai-nilai agama dan nilai-nilai moral diharapkan narapidana lebih

mendekatkan diri kepada Tuhan dan dapat menyadari kesalahan yang telah dilakukannya.

Berdasarkan pada tujuan pemasyarakatan bahwa sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Sehingga melalui pembinaan kerohanian diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran dalam diri narapidana. Narapidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke Fitrahnya menjadi manusia yang lebih baik dan bertakwa kepada Tuhan. Hal tersebut menjadi salah satu tujuan dari pembinaan Kerohanian di Rutan Klas IIB Sidrap seperti yang diungkapkan oleh bapak **Sultan** Kepala Kesatuan Pengaman bahwa:

Tujuan dari pembinaan yang dilakukan yaitu menuntun kembali narapidana agar narapidana dapat menyadari kesalahannya, memperbaiki dirinya, dan setelah keluar nantinya tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Sehingga berdasarkan hal tersebut, pembinaan kerohanian yang diterapkan di Rutan Klas IIB Sidrap yaitu Sholat Berjamaah dan ceramah keagamaan.

a) Sholat berjamaah

Sholat berjamaah merupakan hal wajib yang diterapkan kepada narapidana yang beragama Muslim. Hal ini bertujuan untuk

memberikan pengertian kepada narapidana dalam melaksanakan kewajibannya sebagai umat muslim. Melalui pembinaan dengan penerapan sholat berjamaah diharapkan narapidana nantinya lebih dekat dengan Sang Pencipta. Secara perlahan mereka di didik dan dibentuk untuk taat pada perintah-Nya dengan menjalankan kewajibannya. Seperti yang diungkapkan oleh **A. Rizal** narapidana kasus Narkotika bahwa:

Selama di Rutan Klas IIB saya mendapatkan banyak hidayah dari Tuhan. Saya yang dulunya tidak tahu menahu soal agama, tetapi melalui pembinaan yang saya ikuti selama ini membuat saya lebih dekat dengan Tuhan, Sholat tepat waktu dan saya bersyukur bisa berada di sini karena saya telah belajar lebih banyak dan hal tersebut telah mengubah tabiat saya yang buruk menjadi lebih baik.

Hal senada juga disampaikan **A. Hermanto**, Napi Pidana Umum yang mengungkapkan bahwa Selama di Rutan saya sholat lebih rajin dan tepat waktu. Sedangkan menurut **Ratna** Napi kasus Penipuan mengatakan bahwa ketika sudah bunyi adzan di mushollah Rutan, kami Napi wanita bersama-sama menunaikan sholat di dalam ruang tahanan atau juga ke mushollah menunaikan sholat berjamaah.

Sholat berjamaah tidak hanya dilakukan oleh Napi ataupun tahanan tetapi juga dilaksanakan bersama pegawai Rutan lainnya. Dengan tujuan untuk menciptakan kedekatan dan meningkatkan rasa kekeluargaan antara pegawai Rutan dengan tahanan/narapidana. Sehingga tahanan/narapidana dapat merasa nyaman selama berada di

Rutan dan melaksanakan kewajibannya termasuk mengikuti proses pembinaan dengan baik dan tertib.

b) Ceramah Keagamaan

Ceramah keagamaan berdasarkan protap pembinaan narapidana Rutan Klas IIB Sidrap dilaksanakan setiap hari Selasa. Ceramah keagamaan ini merupakan kegiatan pembinaan kepribadian bagi narapidana Muslim yang dilaksanakan di mushollah Rutan Klas IIB Sidrap. Ceramah keagamaan diberikan sebagai bekal pengetahuan dan pemahaman bagi narapidana dengan kisah para Nabi dan Rasul, pemahaman tentang kejahatan pada umumnya dan khususnya yang banyak terjadi di daerah Sidrap. Selain itu ceramah dapat pula berupa pemahaman tentang nilai-nilai kehidupan, budaya, dan pemahaman hukum.

Melalui pembinaan berupa ceramah keagamaan diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan nilai-nilai agama dalam diri setiap narapidana yang kemudian dapat mereka aplikasikan untuk kehidupan yang lebih baik dengan mengamalkan ajaran agama. memahami nilai-nilai kehidupan serta dapat taat dan sadar hukum.

Ceramah keagamaan disampaikan oleh pihak Rutan dan bekerjasama dengan pihak Departemen Agama. Dari pihak Rutan ceramah keagamaan selalu disampaikan oleh **Salahuddin** selaku Pengelola Pembinaan. Sedangkan dari Pihak Departemen Agama biasanya menunjuk perwakilan seorang Ustadz atau Ustadzah untuk

memberikan ceramah keagamaan di Rutan. Ceramah oleh pihak Rutan dilaksanakan pada Minggu I, Minggu ke III, dan Minggu Ke V setiap bulannya. Sementara dari pihak Depag memberikan materi ceramah pada Minggu Ke II dan Minggu ke IV setiap bulannya. Jika dari pihak Depag berhalangan hadir, maka pembinaan akan tetap berjalan dan digantikan oleh pengelola Pembinaan yaitu bapak Salahuddin.

2. Sanggar Aksara Alqur'an

Sanggar aksara alqur'an merupakan pembinaan di bidang keagamaan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan narapidana tentang Baca, Tulis alqur'an. Selain itu tujuan dari pembinaan ini untuk meningkatkan kemampuan Narapidana dalam melafalkan dan memahami isi kandungan kitab suci alqur'an yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Pembinaan Sanggar Aksara Alqur'an dilaksanakan pada hari Senin, Rabu, Kamis, dan Jum'at. Kelas sanggar Aksara Alquran dilakukan secara bergilir. Khusus pembinaan sanggar aksara alqur'an bagi tahanan/narapidana wanita hanya dilaksanakan satu kali dalam seminggu yaitu pada hari Rabu. Hal tersebut karena jumlah narapidana maupun tahanan sebanyak 14 orang. Sedangkan bagi narapidana Pria pembinaan sanggar Alqur'an dilaksankn pada hari Senin, Kamis, dan Jum'at. Pembinaan sanggar aksara alqur'an dilakukan secara bergilir. Menurut pengelola Pembinaan Kepribadian, bapak **Salahuddin** yang juga merupakan Pembina sanggar aksara alqur'an bahwa:

Pembinaan sanggar aksara alqur'an bagi narapidana/tahanan Pria dilakukan secara bergilir. Hal tersebut karena jumlah tahanan/narapidana Pria hampir 300 orang. Pembinaannya dilaksanakan perkamar. Misalnya hari senin di ikuti oleh kamar A dan B, hari berikutnya kamar C dan D, sampai semua kamar selesai, baru kembali lagi ke kamar A dan begitu seterusnya.

Selain itu, aksara alqur'an menurut bapak **Salahuddin** lebih khusus dilaksanakan bagi narapidana/tahanan yang buta aksara alqur'an guna untuk memberikan pendidikan tentang pengetahuan dan pemahaman tentang baca dan tulis alqur'an.

Dalam penelitian yang dilaksanakan, menurut pengamatan penulis pembinaan keagamaan yang diberikan sangat bermanfaat dan dilaksanakan berdasarkan Protap yang telah ditentukan. Bapak **Salahuddin** selaku Pembina telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan kemampuannya terlepas dari beberapa kekurangan yang masih ada.

3. Pembinaan Paket A

Pembinaan paket A ialah salah satu bentuk pembinaan intelektual bagi narapidana yang Buta Huruf dan belum tamat pendidikan Sekolah Dasar (SD). Pembinaan ini merupakan pembinaan dasar untuk meningkatkan intelektual tahanan/narapidana yang berupa pembinaan pengetahuan membaca, menulis, dan berhitung. Pembinaan ini Menurut bapak **Salahuddin** selaku Pembina kegiatan ini bahwa:

Pembinaan narapidana Paket A bagi tahanan/narapidana yang buta huruf atau belum lulus Sekolah Dasar. Sehingga

memberikan peluang untuk bisa mengikuti ujian nantinya yang biasanya dilaksanakan setiap enam bulan sebagai bentuk evaluasi apakah tahanan/narapidana yang mengikuti kegiatan ini sudah layak atau belum.

Pembinaa dengan Paket A dilaksanakan pada setiap hari senin dan rabu. Pembinaan ini di ikuti oleh 12 (dua belas) narapidana/tahanan dengan daftar sebagai berikut:

Tabel 4.9
Daftar Narapidana Yang Mengikuti Program Pembinaan Paket A

Nama	Kamar
Bakri	B II
Sarifuddin	B IV
Faisal	C III
Risal	B IV
Sanreseng	C III
Lamie	C IV
Sudirman	C IV
Amirullah	B II
Ullah	C II
Ibrahim	D III
Darmawan	B VI
Asrianto	B VII

(Sumber: data pembinaan Paket A Rutan Sidrap)

Namun dalam pelaksanaan pembinaan ini, menurut beberapa narapidana bahwa pembinaan Paket A lebih memfokuskan pada

pendidikan baca tulis saja. Sedangkan untuk pembinaan berhitung belum terlaksana dengan maksimal. Menurut bapak **Salahuddin** selaku Pembina bahwa:

Pembinaan dalam bentuk berhitung itu maksudnya adalah pengenalan awal tentang angka-angka, seperti mengeja angka dengan huruf. Kemudian setelah para Napi telah mampu mengeja dan menghafal angka-angka tersebut, akan ditingkatkan dengan perhitungan, pengurangan, pembagian, maupun perkalian. Yang pada intinya semuanya dilakukan secara bertahap. Saat ini tahapnya masih dalam pengenalan dan pengejaan angka.

4. pembinaan jasmani

pembinaan selanjutnya yang dilaksanakan oleh pihak rutan ialah pembinaan jasmani yaitu dalam bentuk olahraga. Pembinaan ini bertujuan untuk memberikan kebugaran bagi tahanan/narapidana. Pembinaan ini dilaksanakan dalam bentuk senam dan olahraga seperti voli, takraw dan tennis. Senam dilaksanakan dua kali dalam seminggu yakni pada hari selasa dan jum'at. Sedangkan kegiatan olahraga lainnya dilakukan narapidana setiap hari saat jam istirahat mereka selepas sholat ashar hingga menjelang sholat magrib.

Rutan menyediakan sarana olahraga bagi narapida yaitu berupa lapangan tennis dan lapangan voli. Hal ini dilaksanakan dengan tujuan agar narapidana/tahanan tidak jenuh dan menikmati hari-harinya di Rutan dengan berbagai hal yang positif. Sehingga narapidana/tahanan yang berada di Rutan tidak terus menerus larut dalam kesedihan atau keterpurukannya. Selain itu tahanan/ narapidana selama di Rutan tetap

harus memperhatikan kesehatan dan kebugaran fisik maupun rohaninya.

b. Pembinaan kemandirian

1. Kerajinan Tangan

Dalam pelaksanaan pembinaan kemandirian di Rutan Sidrap, diterapkan pembinaan kemandirian berupa kerajinan tangan. Kerajinan tangan yang terbuat dari bahan dasar Koran bekas yang kemudian dikreasikan dalam beberapa karya. Pembinaan kemandirian diikuti oleh semua tahanan/narapidana Pria. Pembinaan ini diawasi oleh bapak **Salahuddin** dengan di bantu oleh salah seorang mantan narapidana.

Pembinaan ini dilaksanakan setiap hari di ruang bengkel kerja yang disediakan. Tahanan/narapidana yang tidak memiliki kegiatan dapat mengisi waktu luang mereka dengan mengikuti pelatihan kerajinan tangan.

Berdasarkan keterangan yang didapat oleh bapak **Salahuddin** bahwa:

Kegiatan ini dilakukan setiap hari oleh narapidana, dibantu oleh Budi seorang mantan narapidana di sini. Mereka melakukan kegiatan ini setiap hari , jika tidak ada kegiatan mereka bisa kesini bantu-bantu yang lainnya, mengerjakan pesanan yang ada.

Banyak karya yang telah dihasilkan oleh tahanan/narapidana dari hasil kerajinan tersebut seperti lemari, asbak, bingkai foto, gitar dan semacamnya. Mereka mengerjakan semua ini dengan bahagia dan menikmati semua hal yang mereka kerjakan.

2. Keterampilan/bakat

Di Rutan terdapat pembinaan khusus yang disediakan berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh tahanan/narapidana yakni salon. Salah seorang narapidana yang memiliki bakat tatarias rambut/pangkas rambut diberikan sarana oleh pihak Rutan untuk tetap bisa menyalurkan bakatnya. Sehingga ketika keluar nanti, bakat yang dimiliki tetap dapat disalurkan dan dilaksanakan sebagai kegiatan positif dan bekal untuk mencari nafkah. Salon tidak hanya melayani tahanan/narapidana tetapi juga Pegawai Rutan yang hendak potong rambut ataupun cat rambut.

3. Pembinaan pertukangan

Pembinaan ini tidak dilakukan secara rutin, sebagaimana pembinaan kemandirian kerajinan tangan. Hal tersebut kerana tempat dan perlengkapan pertukangan yang kurang memadai. Kegiatan seperti ini biasanya dilaksanakan jika ada perbaikan atau pembangunan Rutan. Seperti pada saat peneliti melakukan penelitian di rutan pada 1 Februari 2016 lalu. Pembangunan dan perbaikan Rutan dilaksanakan secara langsung oleh narapidana khususnya yang memiliki latar belakang sebagai seorang tukang. Menurut keterangan yang diperoleh dari bapak **Salahuddin** bahwa :

kegiatan pertukangan seperti ini biasa dilakukan oleh Napi ketika ada perbaikan atau pembangunan gedung, mengingat tempat dan alat yang kurang memadai jadi tidak bisa dilakukan setiap hari. Banyak Napi yang memiliki kemampuan dalam hal pertukangan, jadi dapat dimanfaatkan kemampuan mereka sekaligus mengisi waktu luang kalau

Napi tidak ada kegiatan. Kebetulan ada pembangunan di Rutan jadi tenaga Napi yang dipakai dan selalu seperti ini, jika ada perbaikan atau masalah Napi ikut dilibatkan.

Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan di Rutan Sidrap terdapat beberapa masalah dalam pelaksanaan pembinaan narapidana sebagai berikut:

- a. Pembinaan yang masih kurang efektif, disebabkan karena jumlah tahanan/narapidana sebanyak 301 orang sedangkan pembinanya hanya satu orang saja. Pengawasan terhadap narapidana masih lemah misalnya dalam melakukan sholat berjamaah atau mengikuti ceramah keagamaan. Masih ada beberapa tahanan/narapidana yang tidak mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut atas inisiatifnya. Sebagian dari tahanan/narapidana masih diingatkan dan dikejar layaknya anak SD untuk mengikuti kegiatan tersebut. Meskipun Pembina sudah mengingatkan, tapi kenyataannya masih ada beberapa yang tidak mengikuti kegiatan tersebut dengan berbagai alasannya.
- b. Pembinaan keagamaan bagi Non Muslim. Rutan Sidrap belum memiliki fasilitas untuk memadai kegiatan keagamaan bagi tahanan/narapidana Non Muslim. Sehingga ketika berlangsung pembinaan bagi tahanan/napi yang beragama muslim, tahanan/napi non muslim biasanya melakukan kegiatan kerajinan atau membaca di perpustakaan Rutan. Namun sebagian lainnya hanya berkeliaran di dalam Rutan tanpa aktivitas apapun. Ini menandakan bahwa

pembinaan masih kurang efektif dan kurang disiplin. Pembinaan belum dilaksanakan secara merata.

- c. Pelaksanaan pembinaan intelektual yang masih minim. Pembinaan intelektual yang dilaksanakan ialah paket A, yang hanya diikuti oleh beberapa narapidana yang buta aksara atau belum tamat SD. Sementara itu pendidikan lainnya masih kurang seperti pendidikan tentang pengetahuan umum, tentang teknologi agar narapidana pun dapat melek terhadap teknologi. Hal tersebut pernah disampaikan oleh Kepala Pengamanan Rutan bapak **Amran** bahwa alangkah lebih baiknya kalau ada keterampilan IT, agar nantinya dapat diterapkan oleh narapidana sebagai mata pencaharian jika keluar dari rutan.
- d. Pelaksanaan pembinaan penanaman dan pemahaman Pancasila dan Hukum. Pembinaan ini sangat penting untuk dapat membangun karakter dan meningkatkan pemahaman narapidana tentang nilai-nilai Pancasila yang merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia dan pentingnya pemahaman hukum bagi narapidana karena Indonesia merupakan negara hukum. Pembinaan ini seharusnya dilaksanakan secara teratur, bukan pada saat hari-hari besar yang hanya disampaikan melalui pidato oleh Kepala Rutan ataupun Bupati.
- e. Masih banyak bakat-bakat yang dimiliki oleh narapidana yang tidak dapat dikembangkan dengan baik. Banyak napi yang memiliki bakat

dan keterampilan. Selain itu pembinaan keterampilan yang belum difasilitasi bagi narapidana wanita.

Selain masalah-masalah yang dihadapi dalam pembinaan. Terdapat beberapa hal yang menjadi faktor yang mendukung pembinaan narapidana dapat terlaksana dengan baik berdasarkan Protap pembinaan narapidana seperti:

a. Pegawai/Petugas Rutan Sidrap

Pegawa/Petugasi Rutan yang terbuka dan tidak membatasi diri dengan narapidana, membuat narapidana merasa dihargai, sehingga proses pembinaan dapat dilaksanakan. Selain itu rasa kekeluargaan antara pegawai/petugas dengan narapidana terjalin begitu baik. Pegawai menghargai narapidana, memberikan mereka kesempatan untuk berbicara, berdiskusi, dan membuka ruang bagi narapidana untuk bisa berbaur dengan pegawai lainnya.

Semangat pegawai/Petugas dalam pelaksanaan pembinaan akan berdampak positif pada semangat narapidana dalam mengikuti pembinaan. Keramahan pegawai/Pembina dalam melaksanakan pembinaan akan disambut baik oleh narapidana, sehingga proses pembinaan dapat dinikmati narapidana dengan baik.

b. Rutan sebagai rumah bagi narapidana

Sistem pemasyarakatan yang diterapkan saat ini merupakan upaya untuk memulihkan kembali narapidana melalui pembinaan

bukan pembalasan. Sehingga Rutan bukan penjara tetapi rumah bagi narapidana untuk merenungi kesalahannya, memperbaiki diri, dan mendapatkan bimbingan untuk bisa kembali ke lingkungan masyarakat. Di dalam Rutan semua narapidana sama, tidak ada keluarga bupati, pejabat, status kaya ataupun miskin. Mereka semua sama, seseorang yang ingin memperbaiki diri yang berhak mendapatkan pembinaan dan bimbingan. Sehingga Rutan adalah rumah mereka dan semua narapidana adalah keluarga. Mereka adalah saudara, saling membantu, bercanda bersama, dan bekerja bersama.

c. Kondisi Rutan Sidrap

Meskipun mengalami kelebihan kapasitas, Rutan Sidrap memiliki bangunan yang baik dan pekarangan di dalam yang cukup asri. Hal tersebut karena bangunan rutan yang cukup baru dan terawat hingga saat ini. Kebersihan dan keindahan tetap terjaga guna untuk memberikan rasa nyaman bagi tahanan/narapidana.

d. Narapidana

Narapidana menjadi salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan pembinaan narapidana. Karena pembinaan tidak dapat dilaksanakan tanpa adanya narapida selaku pihak yang akan dibina. Kesadaran narapidana tentang pentingnya pembinaan yang dilaksanakan oleh pihak Rutan membuat pelaksanaan pembinaan dapat berjalan sesuai dengan Protap pembinaan. Keikutsertaan

narapidana dengan kesadaran sendiri akan lebih mempermudah proses pelaksanaan pembinaan.

3. Penerapan UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam Pembinaan Narapidana

Berdasarkan pada hasil penelitian di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidrap tentang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rutan, maka berdasarkan Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan dalam pasal 12 bahwa:

(1) Dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di Lapas dilaksanakan penggolongan atas dasar:

- a. Umur;
- b. Jenis kelamin;
- c. Lama pidana yang dijatuhkan;
- d. Jenis kejahatan; dan
- e. Kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.

(2) Pembinaan Narapidana Wanita di Lapas dilaksanakan di Lapas Wanita.

Pelaksanaan pembinaan narapidana di Rutan Klas IIB Sidrap dilaksanakan berdasarkan UU No. 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Namun dalam rangka pelaksanaan pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) belum diterapkan di Rutan Klas IIB Sidrap. Dalam pelaksanaan pembinaan di

Rutan Klas IIB Sidrap pembinaan dilaksanakan secara merata yaitu pembinaan dilaksanakan tanpa adanya penggolongan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1). Selanjutnya pembinaan narapidana wanita yang seharusnya dilaksanakan di Lapas Wanita berdasarkan pasal 12 ayat (2), pada kenyataannya belum terlaksana karena masih terdapat narapidana wanita yang ditempatkan di Rutan Sidrap dan mengikuti kegiatan pembinaan. Meskipun pelaksanaan pembinaan bagi narapidana pria dan narapida wanita dilakukan secara terpisah.

4. Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

Berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Lebih lanjut dijelaskan dalam Pasal 3 tentang pembinaan dan pembimbingan keperibadian dan kemandirian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi hal-hal yang berkaitan dengan:

- a. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Kesadaran Berbangsa dan Bernegara;
- c. Intelektual;
- d. Sikap dan prilaku;
- e. Kesehatan jasmani dan rohani;
- f. Kesadaran hukum;

- g. Reintegrasi sehat dengan masyarakat;
- h. Keterampilan kerja;
- i. Latihan kerja dan produksi;

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Rutan Sidrap tentang Pelaksanaan Pembinaan narapidana bahwa pembinaan narapidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 PP RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan bahwa pembinaan narapidana telah diterapkan sesuai dengan Protap Pembinaan Narapidana Rutan Klas IIB Sidrap yang terdiri dari Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian.

Selanjutnya berdasarkan pada Pasal 3 PP RI No. 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan, pelaksanaan pembinaan narapidana pada kenyataannya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang ada dengan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

Dalam melaksanakan pembinaan dengan tujuan meningkatkan ketakwaan narapidana kepada Tuhan YME, Rutan Sidrap melaksanakan beberapa program pembinaan berbasis keagamaan seperti Pembinaan Kerohanian yang meliputi kegiatan ceramah Keagamaan dan sholat berjamaah.

Pada kenyataannya Penghuni Rutan Sidrap terdiri dari narapidana yang beragama Islam, Hindu, dan Kristen. Sementara pembinaan kerohanian hanya berorientasi pada Napi yang beragama Islam. Sehingga narapidana non muslim tidak

mendapatkan pembinaan kerohanian. Rutan Sidrap hanya memiliki satu tempat ibadah yaitu Mushollah.

b. Kesadaran berbangsa dan bernegara serta kesadaran hukum

Dalam penerapan pembinaan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada narapidana tentang kesadaran berbangsa dan bernegara serta kesadaran hukum berdasarkan penelitian yang dilakukan di Rutan Sidrap belum diterapkan. Hal tersebut dapat dilihat dari Protap Pembinaan Narapidana Rutan Sidrap yang tidak melaksanakan pembinaan maupun kegiatan berbasis kesadaran berbangsa dan bernegara serta kesadaran hukum.

Berdasarkan pasal 8 ayat (1) PP No. 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan bahwa Dalam melaksanakan Pembinaan Terhadap Narapidana di Lapas di sediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan. Lebih lanjut di jelaskan dalam Penjelasan Atas PP No. 31 tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan bahwa sarana dan prasana yang dimaksud sebagaimana pada pasal 8 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a) Dana pembinaan;
- b) Perlengkapan ibadah;
- c) Perlengkapan pendidikan;
- d) Perlengkapan bengkel kerja;
- e) Perlengkapan olahraga dan kesenian.

Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Pembinaan Narapidana, Rutan Sidrap berdasarkan pada Pasal 8 ayat (1)

dan penjelasan atas Pasal 8 ayat (1) belum sepenuhnya menyediakan sarana dan prasana berikut:

- a. Perlengkapan ibadah, dalam hal ini belum tersedia perlengkapan atau fasilitas ibadah bagi narapidana non muslim
- b. Perlengkapan pendidikan, perlengkapan pendidikan yang dimaksud adalah sarana maupun prasarana bagi narapidana untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman tentang kesadaran berbangsa dan bernegara serta kesadaran hukum. Hal tersebut dapat menjadi pemahaman bagi narapidana tentang perbuatan yang telah dilakukannya dan bekal untuk tidak mengulangi kembali perbuatan maupun melakukan tindak pidana lainnya.
- c. Perlengkapan olahraga dan kesenian, dalam hal penyediaan perlengkapan olahraga dan kesenian. Rutan hanya menyediakan Perlengkapan olahraga namun tidak dengan perlengkapan kesenian.

B. Faktor Faktor yang Menghambat Pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rutan Klas IIB Sidrap.

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan di Rumah Tahanan Negara Sidrap tentang pelaksanaan Pembinaan Narapidana di Rutan Sidrap terdapat beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembinaan tersebut antara laian:

1. Minimnya Petugas/Pegawai Rutan

Petugas/Pegawai merupakan salah satu acuan pelaksanaan kegiatan di Rutan termasuk pembinaan. Dalam pelaksanaan pembinaan di Rumah Tahanan Negara Sidrap, baik Pembinaan Kepribadian maupun Pembinaan Kemandirian dilakukan oleh seorang Pegawai Rutan yaitu bapak Salahuddin. Dalam pelaksanaan Pembinaan bapak Salahuddin bertanggung jawab atas narapidana yang ada. Hal tersebut dapat menyebabkan proses pembinaan kurang efektif. Meskipun diakui bapak Salahuddin bahwa ia dapat melaksanakan pembinaan dengan baik dan tidak kewalahan .

Kekurangan Pegawai/Petugas tentu memiliki pengaruh dalam proses pengelolaan Rutan Sidrap. Hal tersebut juga diakui oleh bapak **Syamsul Bahri** bahwa:

Rutan sangat kekurangan pegawai, sekarang jumlah pegawai sebanyak 33 (tiga puluh tiga) orang sementara jumlah tahanan dan narapidana per hari ini sebanyak 301 orang. Jelas Rutan sangat membutuhkan pegawai apalagi dalam pembinaan dan pengawasan terhadap tahanan dan narapidana.

2. Anggaran

Anggaran merupakan sesuatu hal yang penting karena anggaran dapat mendukung ataupun menghambat berbagai kegiatan dalam Rutan. Besar atau kecilnya anggaran yang dialokasikan pemerintah kepada Rutan Sidrap menjadi salah satu acuan pembinaan narapidana. Apalagi pihak rutan tidak memiliki kerjasama dengan perusahaan-perusahaan atau pihak luar terkait pendanaan. Bahkan hasil

kerja narapidana dari pembinaan kerajinan tangan hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam pelaksanaan pembinaan kerajinan dan sebagian diberikan kepada narapidana. Prasarana maupun sarana yang belum memadai dikarenakan anggaran yang diterima harus dialokasikan ke hal-hal yang lebih mendesak lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan bapak **Syamsul Bahri**, beliau mengatakan bahwa:

Anggaran merupakan salah satu faktor penting dalam pembinaan, kita belum bisa memfasilitasi berbagai kegiatan pembinaan karena anggaran yang harus disesuaikan, apalagi jumlah tahanan/narapidana yang *over* sehingga biayanya harus diperhitungkan pula untuk kepentingan dalam rutan dan kebutuhan tahanan/ narapidana.

3. Sarana dan prasarana

Sarana dan prasarana menjadi faktor yang penting dalam pelaksanaan pembinaan. Sarana dan prasarana yang kurang memadai dapat menjadi penghambat pembinaan narapidana. Banyak bakat yang dimiliki oleh narapidana namun belum mampu direalisasikan mengingat prasarana dan sarana yang tidak mendukung.

Seperti yang dikatakan oleh bapak **Salahuddin** bahwa:

Banyak bakat yang dimiliki oleh narapidana, seperti misalnya pertukangan, namun sayangnya tempat dan alatnya yang tidak ada. Sehingga kegiatan pertukangan tidak dapat dilaksanakan secara teratur, hanya dilaksanakan ketika ada pekerjaan seperti perbaikan atau pembangunan dalam rutan.

4. Kerjasama dengan Pihak Luar

Kerjasama dengan pihak luar dapat membantu dalam berbagai hal, misalnya dalam hal pendanaan pihak Rutan dapat berkerjasama sama

dengan perusahaan-perusahaan yang membutuhkan tenaga dalam hal ini tenaga narapidana dalam melaksanakan pekerjaan tertentu, seperti pembinaan kemandirian. Selanjutnya kerja sama misalnya dari departemen sosial, departemen agama, maupun departemen hukum dan HAM dan sebagainya yang dapat membantu pihak Rutan dalam melaksanakan pembinaan. Menurut bapak **Salahuddin** bahwa pihak Rutan memiliki kerjasama dengan Depag dalam pembinaan kerohanian berupa ceramah keagamaan yang dilaksanakan setiap hari Selasa.

Sedangkan berdasarkan keterangan dari bapak **Syamsul Bahri** bahwa:

Selam beberapa tahun ini, khususnya pada tahun 2016 pihak rutan tidak pernah melakukan kerjasama dalam bentuk apapun dengan pihak luar atau pihak ketiga. Baik itu dalam bentuk pembinaan atau sosialisasi, maupun pendanaan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Sistem pembinaan Narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidrap yaitu sistem Pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. selanjutnya Pelaksanaan Pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidrap telah dilaksanakan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan dalam Pasal 2 ayat (1) bahwa program pembinaan dan pembimbingan meliputi kegiatan pembinaan dan pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Berdasarkan pada Protap Pembinaan Narapidana Rutan Sidrap bahwa pembinaan narapidana terdiri dari Pembinaan Kepribadian dan Pembinaan Kemandirian. Selanjutnya berdasarkan pada Pasal 3 PP RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan yang terdiri dari beberapa hal yaitu Ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa; Kesadaran berbangsa dan bernegara; intelektual; sikap dan perilaku; kesehatan jasmani dan rohani; kesadaran hukum; reintegrasi sehat dengan masyarakat; keterampilan kerja; dan latihan kerja dan produksi menunjukkan

bahwa beberapa hal tersebut belum sepenuhnya diterapkan dalam pelaksanaan pembinaan Narapidana di Rutan Sidrap.

2. Adapun faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan narapidana di Rutan Kelas IIB Sidrap antara lain:
 - a. Minimnya Petugas/Pegawai Rutan
 - b. Anggaran
 - c. Sarana dan prasarana
 - d. Kerja sama dengan pihak lain

B. Saran

Dalam pelaksanaan pembinaan narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidrap, tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa hal yang menjadi kendala ataupun faktor penghambat pelaksanaan pembinaan. Sehingga berdasarkan kesimpulan diatas, berikut saran-saran penulis berdasarkan penelitian di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Sidrap:

1. Pengadaan kegiatan pembinaan kerohanian bagi umat non-muslim, karena pembinaan kerohanian merupakan salah satu pembinaan yang sangat mendasar dalam membentuk kepribadian seseorang melalui pemahaman dan nilai-nilai agama.
2. Pengadaan pembinaan Penanaman dan Pemahaman Pancasila dan pengetahuan Hukum. Hal tersebut bertujuan agar narapidana paham nilai-nilai pancasila dan dapat mengamalkannya dalam

kehidupan sehari-hari sebagai warga negara. Serta narapidana pun dapat tahu atau melek hukum.

3. Pengadaan sarana dan prasarana, mengingat setiap narapidana memiliki bakat yang beragam, sehingga dalam upaya mengembangkan diri, pihak Rutan hendaknya menjadi fasilitator untuk mengembangkan bakat dan kemampuan narapidana.
4. Penambahan jumlah pegawai karena jumlah pegawai Rutan saat ini masih jauh jika dibandingkan dengan jumlah penghuni Rutan. Khususnya pegawai dalam hal pelaksanaan pembinaan, Pembina yang memiliki kemampuan atau pengetahuan yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan narapidana. Misalnya Pembina yang paham tentang hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

A.Zainal Abidin Farid. 2010. **Hukum Pidana 1**. Sinar Grafika: Jakarta.

A. Zainal Abidin Farid dan A.Hamzah. 2008. **Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik (Percobaan, Penyertaan, dan Gabungan Delik) dan Hukum Penitensier**. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.

Achmad Ali. 2012. **Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)**. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Andi Hamzah. 2010. **Asas-Asas Hukum Pidana**. Rineka Cipta: Jakarta.

Andi Sofyan, Abd. Asis. 2014. **Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar**. Prenadamedia Group: Jakarta

Bambang Waluyo. 2014. **Pidana dan Pemidanaan**. Sinar Grafika: Jakarta.

Barda Nawawi Arief. 2011. **Bunga Rampai: Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)**. Kencana Prenada Media Group: Jakarta.

Dwidja Priyatno. 2013. **Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia**. PT Refika Aditama: Bandung.

Eddy O.S. Hiariej. 2014. **Prinsip-Prinsip Hukum Pidana**. Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta.

Leden Marpaung. 2009. **Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana**. Sinar Grafika: Jakarta.

P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. 2014. **Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia**. Sinar Grafika: Jakarta.

P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang. 2012. **Hukum Penitensier di Indonesia**. Sinar Grafika: Jakarta.

Syaiful Bakhri. 2009. **Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia**. Total Media: Yogyakarta.

Tolib Setiady. 2010. **Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia**. ALFABETA: Bandung.

Yuyun Nurulaen. 2012. **Lembaga Pemasyarakatan Masalah & Solusi (Perspektif Sosiologi Islam)**. MARJA: Bandung

Skripsi:

Andi Muhammad Iqra Kusumaatmaja. 2015. **Implementasi Hak Hak Tahanan Di Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar**. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Lucky Restu Aditama. 2015. **Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Blora**. Universitas Negeri Semarang. Semarang.

Normanir. 2011. **Pembinaan Terhadap Narapidana Yang Melakukan Tindak Pidana Psikotropika Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas IIA Sungguminasa**. Universitas Hasanuddin. Makassar.

Nur Jayani. 2013. **Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Jepara**. Universitas Negeri Semarang. Semarang

Dokumen:

Profil Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidrap

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sidrap.Semester II Tahun 2016

Peraturan Perundang-undangan:

Undang Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang Syarat Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.04-UM.01.06 Tahun 1983 tentang Cara Penempatan, Perawatan Tahanan, dan Tata Tertib Rumah Tahanan.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan

Internet:

Isnawati. 2014. Peran Tamping Dalam Pembinaan Narapidana Di Rumah Tahanan Negara Klas IIA Samarinda. Universitas Mulawarman. Samarinda. Diakses di <http://ejournal.sos.fisip-unmul.org>. pada 13/11/16

<http://www.hukumpedia.com/erasmus70/over-kapasitas-lapas-dan-rutan-jumlah-penghuni-dan-masalah-utama>. diakses pada 17/11/16. pukul. 22.15 Wita

<file:///C:/Users/ASUS%20PC/Documents/jurnal/Rutan%20Sidrap%20Sudah%20Layak%20Jadi%20Lapas%20%E2%80%93%20Berita%20Kota%20Makassar.htm>. Diakses pada 03/12/16. Pukul. 21.25 Wita

<http://rutanpadangpanjang.blogspot.co.id/2013/07/struktur-organisasi-rumah-tahanan.html>. JUMAT 24 February 2017